

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Prespektif Ekonomi Islam”**

Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup> Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

---

<sup>1</sup> Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 65.

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.<sup>2</sup>

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang.<sup>4</sup> Daerah tertinggal merupakan suatu daerah dengan kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.<sup>5</sup> Prespektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau juga bisa diartikan sebagai cara pandang.<sup>6</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

---

<sup>2</sup> Agus Sulistyono, Adhi Mulyono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: ITA, 2008), h. 78.

<sup>3</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 54.

<sup>4</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h. 13

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Identifikasi Masalah-Masalah Daerah Ketertinggalan Kabupaten Daerah Tertinggal*, (Jakarta Pusat: Dikjen PDT, 2016), h. 1.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 675.

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumberdaya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.<sup>7</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang “analisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam prespektif Ekonomi Islam” Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh karena itu sangat memungkinkan dibahas dan diteliti.

Penulis tertarik meneliti permasalahan ini dikarenakan penulis ingin mengetahui mengapa daerah yang kaya akan sumberdaya alam ini terdaftar sebagai daerah yang tertinggal yang ditetapkan dalam lampiran peraturan Presiden No 131 Tahun 2015, hal ini tentu saja tidak selaras dengan besarnya potensi sumber daya yang ada dari berbagai macam sektor. Sumber daya yang ada di kabupaten Pesisir Barat sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Apabila sumberdaya yang ada di Pesisir Barat tersebut dipergunakan dan dimanfaatkan dengan bijak oleh pemerintah dengan mendayagunakan masyarakat, sebagaimana konsep pembangunan Islam yang menganggap masyarakat sebagai obyek utama

---

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19.

dalam pembangunan, maka hal ini tentunya berpengaruh pada aspek pendapatan daerah, yang pada akhirnya berpengaruh pada pembangunan, infrastruktur dan sebagainya, maka tentunya pemberdayaan oleh pemerintah daerah perlu diberlakukan, sebagai pemegang otoritas kebijakan yang harus diterapkan dalam menanggulangi keteringgalan pembangunan. Sebagaimana halnya Undang-Undang No.25/Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No.32/tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pembangunan di daerah diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya sebagai pengawas atau pengontrol, sehingga masing-masing wilayah harus berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan kebijakan dan pembangunannya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengejar ketertinggalan daerahnya masing-masing.<sup>8</sup>

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah SWT untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi pemerintah adalah agen dari Tuhan, atau khalifatullah, untuk merealisasikan *falah*.<sup>9</sup> Pemerintah kabupaten Pesisir Barat dituntut membuat suatu kebijakan yang *pro-rakyat*, yaitu peduli dengan kehidupan masyarakat yang masih dalam belenggu kemiskinan. Terlihat bahwa pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Zulfa Emalia, "Analisis Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar kabupaten/kota di Propinsi Lampung", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 No.1 (Maret 2012), h. 2.

<sup>9</sup> *Op. Cit*, h. 446.

pembangunan belum merata, masih banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, akses belum memadai dan lingkungan di bawah standar. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah, swadaya masyarakat kurang berkembang, bahkan sering terhambat perkembangannya sebagai akibat suatu kebiasaan tertentu yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh sebabnya pemerintah juga pada dasarnya pemegang amanah dari masyarakat. Bahwasanya Allah SWT menegaskan :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

*“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”. (Qs. Al-Ma’aarij : 32).<sup>10</sup>*

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Qs. Az-Zariat : 19)<sup>11</sup>*

## 2. Alasan Subjektif

Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

<sup>10</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 975 .

<sup>11</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Madinah: Al-Quran Raja Fahad, 2015), h. 857.

### C. Latar Belakang Masalah

Masalah pembangunan yang terjadi pada suatu negara dan wilayah bagian nampaknya tidak kunjung selesai.<sup>12</sup> Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan daerah yang terencana dan sistematis agar daerah tersebut dapat mempercepat pembangunannya.

Ketertinggalan Pembangunan disuatu daerah harus mandapati perhatian yang serius, disebabkan banyak kasus yang membuktikan bahwa merebaknya tekanan kemiskinan, tingkat pengangguran tinggi, angka melek huruf serta kurangnya kemampuan daya beli masyarakat menyebabkan timbulnya sejumlah akibat yang kontra-produktif bagi pembangunan. Seperti dikatakan Kwik Kian Gie di dalam tulisan Lesna Wanita, apabila hal tersebut tidak segera tertangani akan memicu : (1) tingginya beban Sosial Ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia, (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat pada birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan (6) kemungkinan terjadinya kemerosotan mutu generasi yang akan datang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M.J Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, (Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara: Jakarta), 1991, h. 2.

<sup>13</sup> Lesna Wanita, "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Inuman Tahun 2007-2011". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2014), h. 1.

Berdasarkan jumlah Kabupaten di Provinsi Lampung, terdapat lima belas kabupaten dan tiga diantaranya masih termasuk kabupeten baru yaitu Kabupaten Peringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pesisir Barat. Badan Pusat Statistik, mencatat bahwa dari ketiga kabupaten tersebut Kabupaten Pesisir Barat merupakan nilai terendah PDRB-nya.

Tabel 1.1

## PDRB Kabupaten Kota (Baru)

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012-2015

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014*	2015**
1	Pesawaran	8.730.593	9.668.703	10.846.286	12.477.846
2	Peringsewu	5.887.901	6.456.777	7.360.050	8.088.127
3	Pesisir Barat	2.390.013	2.595.451	2.922.226	3.327.659

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang secara resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Kabupaten Pesisir Barat terbentuk tanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.<sup>14</sup> Secara astronomis, Pesisir Barat terletak antara 5 21' sampai 5 28' Lintang Selatan dan antara 105 48' sampai 105 48' Bujur Timur. Luas wilayah Pesisir Barat, adalah berupa daratan seluas 2.346,07 km<sup>2</sup>. Ibukota Kabupaten adalah Krui. Sejak tahun 2012, Kabupaten Pesisir Barat mulai memisahkan diri dari

<sup>14</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat Tahun 2015 (Online), tersedia di: [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/01/09/p/p/pp\\_no.78-2014.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/01/09/p/p/pp_no.78-2014.pdf). (10 November 2017). Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012. Wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 wilayah kecamatan, yaitu, Bengkunt, Bengkunt Belimbing, Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong, dan Pulau Pisang<sup>15</sup>.

Daerah tertinggal merupakan suatu daerah yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Berdasarkan kriteria daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) Sumberdaya Manusia, (3) Prasarana (*infrastruktur*), (4) Kemampuan keuangan daerah, (5) Aksesibilitas dan, (6) Karakteristik daerah. Pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunannya dimana tidak hanya meliputi pembangunan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, budaya dan keamanan. Berdasarkan kriteria tersebut di Pesisir Barat terdapat 11 (sebelas) kecamatan yang termasuk daerah tertinggal.<sup>16</sup> Berdasarkan kondisi infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat terutama jalan, banyak dipengaruhi oleh faktor geografis. Rendahnya tingkat kemantapan jalan diperparah dengan tonase kendaraan yang jauh lebih berat dibanding dengan

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, *Pesisir Barat Dalam Angka 2017*, (Kabupaten Lampung Barat: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2017), h. 8.

<sup>16</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, *Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat Tahun 2015*, *Op.Cit*, h. 9.

kelas jalan yang dilalui, akibatnya jalur lalu lintas menjadi terhambat. Disamping itu masih terdapat wilayah yang terisolasi yang bertopografi pegunungan, yang menyebabkan aksesibilitas penduduk rendah. Pada beberapa daerah masih terdapat daerah yang terisolasi karena akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Akibatnya sebagian besar penduduk mengalami kesulitan melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial. Dengan sebaran penduduk yang mengelompok tersebut, berdampak pada kesulitan penyediaan energi listrik dan sarana telekomunikasi. Sejak tahun 2014 kondisi infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat selalu mengalami perubahan, tercatat kondisi jalan sampai di tahun 2015 mengalami peningkatan<sup>17</sup>. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat 2014-2015

No	Kondisi Jalan	Tahun	
		2014	2015
1	Baik (Km)	80,35	174,35
2	Rusak Ringan (Km)	45	95
3	Rusak Sedang (Km)	56,95	56,95
4	Rusak Berat (Km)	206,5	285,85

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015

Kualitas pendidikan di Pesisir Barat secara psikologis SDM tercatat sejak tahun 2015 terbilang cukup, walaupun masih belum terbilang kategori sangat baik. Hal ini ditandai dengan jumlah sekolah yang cukup tersebar keberbagai kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, serta ditandai dengan persentase kelulusan murid SD

<sup>17</sup> Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), *Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015*, (Kabupaten Pesisir Barat: TKPK, 2015), h. 106.

hingga SMA mencapai hampir lebih 90 persen baik untuk sekolah negeri maupun swasta.<sup>18</sup> Namun persebaran sekolah tersebut tentunya belum cukup optimal untuk menghasilkan SDM yang memiliki kualitas, karena sebagian besar sekolah yang tersebar di wilayah tersebut hanya sekolah yang berdasarkan kategori umum seperti TK, SD, SMP, dan SMA, sedangkan untuk Sekolah Kejuruan dan Sekolah Tinggi masih belum memadai dan belum tersebar keberbagai wilayah. Berdasarkan psikologis kemampuan (masyarakat) di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat melalui Tingkat Pendidikan yang tersebar secara keseluruhan di wilayah tersebut, demikian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (tdk sekolah-SLTA)  
di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Desa/ Kel	Tingkat Pendidikan				
			Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	SLTP Sederajat	SLTA Sederajat
			1	Pesisir Selatan	15	2.925	3,561
2	Pesisir Tengah	8	3015	2536	3235	3774	4339
3	Pesisir Utara	12	837	1550	2467	1441	2002
4	Karya Penggawa	12	2249	1461	4709	3031	3592
5	Lemong	13	2078	1885	4859	2622	1947
6	Bengkunat	9	1406	2436	2680	959	1173
7	Ngambur	9	3889	2566	7115	3068	2268
8	Bengkunat Belimbing	14	5912	4422	4986	4565	3836
9	Wai Krui	10	364	239	1088	2214	2980
10	Krui Selatan	10	1733	1319	2652	2283	2350
11	Pulau Pisang	6	284	108	398	483	451
<b>Jumlah</b>		<b>148</b>	<b>24692</b>	<b>22083</b>	<b>42292</b>	<b>29037</b>	<b>28810</b>

Sumber : *Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat., 2015.*

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik, Pesisir Barat Dalam Angka 2017, *Op.Cit*, h. 74.

Tabel 1.4  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (DI-S3)  
di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Desa/ Kel	Tingkat Pendidikan					Jumlah Penduduk (Jiwa)
			Diploma I/II	Diploma III	Strata I	Strata II	Strata III	
1	Pesisir Selatan	15	169	100	192	14	4	23,494
2	Pesisir Tengah	8	553	577	414	48	0	18,425
3	Pesisir Utara	12	144	165	161	5	0	8,781
4	Karya Penggawa	12	91	89	143	8	1	15374
5	Lemong	13	60	77	67	11	1	13602
6	Bengkunat	9	140	50	76	3	0	11,318
7	Ngambur	9	78	76	110	14	0	19,184
8	Bengkunat Belimbing	14	82	89	110	1	0	24,003
9	Wai Krui	10	1138	972	377	123	52	9546
10	Krui Selatan	10	82	72	93	0	0	10584
11	Pulau Pisang	6	102	79	59	1	0	1965
<b>Jumlah</b>		<b>148</b>	<b>2639</b>	<b>2346</b>	<b>1802</b>	<b>228</b>	<b>58</b>	<b>156.276</b>

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat,, 2015.*

Berdasarkan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki target anggaran pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar 766,30 miliar rupiah. Dari nominal tersebut, berhasil tercapai sebesar 738,44 miliar rupiah. Pendapatan daerah tersebut utamanya bersumber dari Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) yang berhasil direalisasikan sebesar 645,54 miliar rupiah yang terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus; dan Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Pendapatan daerah ini digunakan untuk membiayai belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung yang realisasinya di tahun 2016 sebesar 732,74 miliar rupiah.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 186.

Tabel 1.5  
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  
(Miliar Rupaih), 2016

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Milyar Rupiah)	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19,79	20,71
2	Pendapatan Transfer	674,32	645,54
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	72,14	72,18
<b>Jumlah</b>		<b>766,30</b>	<b>738,44</b>

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pesisir Barat , 2017

Tabel 1.6  
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  
(Miliar Rupaih), 2016

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Milyar Rupiah)	
		Anggaran	Realisasi
1	Belanja Langsung	496,16	448,47
2	Belanja Tidak Langsung	348,70	284,27
<b>Jumlah</b>		<b>844,86</b>	<b>732,74</b>

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pesisir Barat , 2017

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang cenderung berorientasi pada pembangunan wilayah yang paling mudah dikembangkan menjadi daerah pusat-pusat pertumbuhan dan kecenderungan untuk mengesampingkan daerah yang miskin potensi, disamping itu terjadi kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat. Kondisi daerah Pesisir Barat meskipun mempunyai potensi yang besar, namun pengelolaannya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menyebabkan daerah-daerah yang relatif jauh dari pusat pertumbuhan dan relatif

miskin sumber daya menjadi daerah yang tertinggal dalam pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat, perlu mempunyai kebijakan pembangunan yang dilengkapi dengan program redistribusi pendapatan, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memperbaiki tingkat pendapatan yang berujung pada pembangunan perekonomian serta diantaranya untuk penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, yang demikian itu perlu dilakukan identifikasi terkait permasalahan di setiap wilayah kabupaten Pesisir Barat dan selanjutnya disusun kebijakan yang relevan.

Pemerintah daerah perlu menyusun berbagai program secara terintegrasi. Program tersebut haruslah *sustainable*, yaitu perlu mempertimbangkan kondisi lokal dimana ketertinggalan itu bisa terjadi. Program dalam upaya percepatan pembangunan memerlukan strategi yang terarah dan jelas yang didasarkan pada prinsip kemandirian, yakni pemerintah pula dapat mempercayakan juga kepada masyarakat daerah itu sendiri, dalam pengelolaan sumber daya. Sehingga bukan saja program tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah untuk pembangunan ekonomi, akan tetapi juga akan membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pribumi atau daerah setempat. Sebagaimana firman Allah Swt :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
تَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Qs. Az-Zukhruf : 32).<sup>20</sup>*

Pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan perlu menerapkan program-program sebagai strategi dan bentuk kebijakan yang tidak lepas dengan berdasarkan konsep pembangunan Ekonomi Islam. Sebagaimana mayoritas penulis memahami konsep pembangunan ekonomi dari beberapa ayat Al-Qur'an.

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ...

*“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya” (Qs. Hud : 61).<sup>21</sup>*

Berdasarkan ayat di atas mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan. Pertama makna *Al-Wujub* atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan.<sup>22</sup> Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun

<sup>20</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kiaracandong Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 489.

<sup>21</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2010), h. 402.

<sup>22</sup> Ahmad Ibn Ali Al-Jassas, *Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Mathba-ah al-Auqof al-Islamiyah, 1335 H), h. 432.

jagad raya.<sup>23</sup> Perintah Allah SWT tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis berpendapat kata *Al-Imarah* (memakmurkan) identik dengan kata *at-tanmiyah al-iqtisadiyah* (Pembangunan Ekonomi). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Prespektif Ekonomi Islam”**

#### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana faktor peluang, ancaman, kelemahan dan kekuatan dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di daerah Kabupaten Pesisir Barat?
3. Bagaimana strategi Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah?

---

<sup>23</sup> Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurthubi, *Al- Jami'li – Ahkam Al-Quran* (Dar al- Kutub al Misriyah, 1369 H), h. 648.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam perspektif Ekonomi Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana faktor peluang, ancaman, kelemahan dan kekuatan dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ; *Pertama* bagi akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran tentang langkah kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat serta menambah literatur kepustakaan yang relevan dengan bidang Studi Ekonomi Pembangunan ; *Kedua* bagi penulis, menambah wawasan mengenai program kebijakan Pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertiggal prespektif Ekonomi Islam.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan; *Pertama* bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan rekomendasi untuk membuat kebijakan yang sistematis dan terencana,

yang dapat dituangkan pada program-program dalam upaya percepatan pembangunan. *Kedua* bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya ikut berpartisipasi membangun daerah yang berlandaskan konsep pembangunan Ekonomi Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Secara keseluruhan jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi<sup>24</sup>. Bilamana terdapat ilustrasi yang menunjukkan data-data berupa angka tabulasi, hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mempertajam analisa dan memperkuat argumentasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk interpretasi, gambaran, dan lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. Ke-8* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997), h. 6.

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara<sup>26</sup>. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan secara langsung, kemudian dipilih beberapa responden secara sengaja seperti Kabid dan Aparatur bagian perencanaan di Bappeda, serta masyarakat dan nelayan sebagai pendukung guna kelengkapan data.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>27</sup> Data sekunder juga merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk table-tabel dan diagram.<sup>28</sup> Data sekunder juga diperoleh dari sumber bacaan yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, peraturan pemerintah, dokumen RKPD kabupaten, laporan keuangan daerah, dan bahan-bahan penelitian yang relevan terhadap penulisan skripsi ini serta

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cet Ke-5 (Bandung: CV Alfabeta, 2003), h. 32.

<sup>27</sup> Soeranto, Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Hukum dan Bisnis* ( Yogyakarta: UPP YKPN, 1990), h. 76.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 76

buku-buku mengenai ekonomi pembangunan daerah, pembangunan Islam, Ekonomi Islam dan lain sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara langsung ke lapangan untuk mencari keterangan dan informasi yang relevan dengan objek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak legal pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program kebijakan pemerintah dalam menanggapi keteringgalan pembangunan ekonomi, seperti bentuk program kebijakan ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia dan penciptaan SDM yang kompetitif, perbaikan infrastruktur, perbaikan kapasitas keuangan daerah, serta aksesibilitas dan karakteristik.

#### **b. Observasi**

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>29</sup> Metode ini penulis

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 145

gunakan sebagai penunjang untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh mengenai daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto, dan juga berbentuk file di server, dan *flashdisk*, serta data yang tersimpan di *website*. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.<sup>30</sup>Data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan pemerintah Negara, Provinsi/Kabupaten tentang Percepatan *Pembangunan Daerah Tertinggal*, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi/Kabupaten, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi/Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan berita resmi tentang perekonomian Provinsi/Kabupaten.

## 4. Subyek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah data penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara dan observasi yang berupa sikap, ekspresi, pendapat, pengalaman, karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).<sup>31</sup>Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Kepala Bidang dan Aparatur bagian

<sup>30</sup> Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141.

<sup>31</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.158

Perencanaan di Bappeda, serta masyarakat dan nelayan di Kabupaten Pesisir barat.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah tempat penelitian dimana fanomena atau gejala sosial yang akan diteliti.<sup>32</sup>Dalam penelitian ini objek penelitiannya bertempat di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

### **5. Pengolahan Data**

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data adalah menimbang menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan.<sup>33</sup>Menimbang, menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan yaitu menggolongkan, menyusun, menurut aturan tertentu.<sup>34</sup>Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 292

<sup>33</sup> *Op. Cit.*, h. 135.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 86.

- c. Rekonstruksi data (*reconstucting*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berulang, sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi Data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>35</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi suatu daerah yang berasal dari sumber daya dan kemampuan internal yang dimiliki daerah tersebut, serta sejumlah peluang yang selama ini belum dimanfaatkan. Misalnya akibat adanya kekurangan dalam kemampuan internal daerah itu sendiri<sup>36</sup>. Menurut Jogiyanto (2006), SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki daerah dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi<sup>37</sup>.

Setiap daerah memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional, tidak ada daerah yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area. Kekuatan dan kelemahan (internal), digabungkan dengan peluang atau ancaman (eksternal) dan pernyataan tujuan yang jelas menjadi dasar untuk penetapan strategi. Strategi yang dimaksud yaitu memanfaatkan kekuatan

---

<sup>35</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT.Cipta Aditya Bakti., 2004), h. 126.

<sup>36</sup> Ismail Solihin, *Manajemen Strategik* (Bandung: Erlangga, 2012), h. 164.

<sup>37</sup> Jogiyanto, *Sistem Informasi Strategik Untuk Keunggulan Kompetitif* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 46.

internal dan mengatasi kelemahan<sup>38</sup>. Berikut ini merupakan penjelasan dari SWOT, yang dikemukakan oleh David, Fred R (2005), yaitu:

1. Kekuatan (*Strengths*). Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan dan keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan apa yang dimiliki daerah tersebut. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi daerah-daerah lain.
2. Kelemahan (*Weakness*). Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumberdaya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan suatu daerah.
3. Peluang (*Opportunities*). Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan. Kecendrungan-kecendrungan penting merupakan salah satu sumber peluang.
4. Ancaman (*Threats*). Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan. Ancaman juga bisa berupa peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau direvisi dapat memberikan ancaman bagi suatu daerah yang ingin berkembang.<sup>39</sup>

Berdasarkan teori di atas maka fungsi SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkan dalam pokok

---

<sup>38</sup> David, Fred R, *Manajemen Strategis, edisi ke-10* (Jakarta: Selamba Empat, 2006), h. 8.

<sup>39</sup> David, Fred R, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Selamba Empat, 2005), h. 47.

persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Secara kualitatif, analisis ini merupakan alat analisis yang biasa digunakan untuk melakukan analisis situasional dalam formulasi strategi. Dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal yang kemudian dikaitkan dengan konsep pembangunan ekonomi islam dan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Metode berfikir yang digunakan, yaitu deduktif. Deduktif adalah metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio-rasio<sup>40</sup>. Dengan metode ini, penulis mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan daerah tertinggal. Kemudian menuju pernyataan yang khusus, yaitu memaparkan keadaan dilapangan, disini penulis memaparkan bagaimana responsif pemerintah terhadap daerah tertinggal dalam bentuk program yang dijadikan sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah, dan kemudian dianalisis dengan konsep pembangunan ekonomi islam.

---

<sup>40</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 6.

## G. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa hal yang penting diketahui dalam penelitian terdahulu adalah lokasi, teknik analisis, variable, dan hasil penelitian. Penelitian tentang analisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal perspektif Ekonomi Islam, telah digunakan dalam berbagai penelitian, seperti Wahid Abdullah (2006) yang mengambil penelitian tentang strategi pembangunan daerah tertinggal studi kasus Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan (evaluasi) dalam menyusun rencana-rencana atau strategi pembangunan daerah tertinggal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu wilayah. Imam H. wahyudin (2002) , studi tipologi kawasan tertinggal sebagai dasar penentuan potensi alokasi dana penanganan kawasan tertinggal (studi kasus kabupaten Bondowoso, jawa Timur), dengan hasil penelitian pembagian 76 kawasan tertinggal di Kabupaten Bondowoso menjadi 8 tipe desa dengan karakteristik yang berbeda. Tipologi desa tertinggal tersebut menjadi dasar dalam penentuan alokasi dana penanganan kawasan tertinggal.

Almasdi Syahza (2011), strategi pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan. hasil penelitian mengkaji wilayah Pesisir di Provinsi Riau yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan dengan kebijakan ekonomi

melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan sektor pertanian diarahkan pada system agribisnis. (Novi Sulistyaningsih, 2007), identifikasi karakteristik kawasan tertinggal di Kota Semarang, hasil penelitian menentukan karakteristik kawasan tertinggal di Kota Semarang dengan menggunakan beberapa perbandingan yaitu kawasan tertinggal (miskin), harga lahan, ketersediaan saran dan lokasi.

Rian Ganesha (2008), Implentasi kebijakan pengembangan pertanian dalam revitalisasi pertanian Daerah tertinggal di Kecamatan Toboali di Kabupaten Bangka Selatan, hasil penelitian menganalisis bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pertanian di daerah tertinggal dengan sasaran penelitian mengkaji karakteristik kelembagaan dan implementasi kebijakan. Berdasarkan kelima penelitian tersebut, penelitian analisis spasial daerah tertinggal belum tentu memiliki kesamaan, karena berdasarkan lokasi memiliki perbedaan, secara teori, bahwa setiap lokasi atau wilayah memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga dalam memperoleh informasi atau kondisi berbeda pula meskipun menggunakan metode analisis yang sama dengan wilayah lain.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Andi Nurasiar Rahmah, "Analisis Spasial Daerah Tertinggal di Kabupaten Bombanda". (Skripsi Program Sarjana Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016), h. 28.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Konsep Pembangunan Ekonomi**

##### **1. Pembangunan Ekonomi**

Ekonomi pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang bersifat terapan (*applied economics*). Cabang ilmu Ekonomi ini lahir setelah terjadinya perang dunia kedua atau dua abad setelah lahirnya ilmu ekonomi pada tahun 1776 Masehi. Ilmu ini diperlukan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Negara-negara yang baru merdeka. Pada umumnya negara-negara ini adalah negara yang sedang berkembang dan menghadapi masalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Oleh karenanya mereka bermaksud mengatasi masalah-masalah tersebut hingga cepat, tepat, dan tuntas. Berlandaskan kepada kedua-dua sifat dasar ini, maka analisa ekonomi pembangunan dapatlah didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang dan mendapatkan

cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya Negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi<sup>42</sup>.

Menurut Nurjanah (2006), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial dalam suatu wilayah secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik<sup>43</sup>. Pembangunan tidak hanya diartikan sebagai suatu proses perubahan, namun juga dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Sedangkan pembangunan sebagai suatu proses pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan<sup>44</sup>.

Ekonomi pembangunan banyak menyangkut dengan formulasi kebijakan pemerintah baik ekonomi maupun non-ekonomi yang diantaranya melibatkan variabel-variabel ekonomi makro secara langsung seperti *income*, investasi kesempatan kerja (*employment*), dan gabungan faktor-faktor non-ekonomi yang sama relevan seperti alokasi sumber daya alam yang efisien,

---

<sup>42</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan* (Jakarta: Bima Grafika dan LP FE UI, 1985), h. 11.

<sup>43</sup> Nurjanah, S, "Strategi Pembangunan Wilayah Tertinggal Study Kasus Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten". (Skripsi Program Sarjana Institut Patanian Bogor , Bogor, 2006), h. 41.

<sup>44</sup> Sondang Septiani Rosalina, "Analisis Faktor-faktor Penentu Ketertinggalan Wilayah KBI dan KTI". (Skripsi Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2008), h. 16.

institusional, usaha-usaha perbaikan diri, nilai-nilai, sikap-sikap ekonomi dan politik baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mempercepat skala tingkat hidup. Oleh sebab itu ekonomi pembangunan (*development economics*) dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dan cara untuk mengatasi masalah-masalah itu sendiri dan membangun ekonominya lebih cepat.<sup>45</sup>

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur. (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru, (2) usaha meningkatkan pendapatan perkapita, (3) kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah dan dasar kebijaksanaan*, (Jakarta: LPFE-UI, 1985), h. 4.

<sup>46</sup> Suryana, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, (Jakarta: Selamba Empat, 2000), h.3.

Sebagaimana para ahli dan para perencana ekonomi pembangunan nampaknya terjadi evolusi dalam pemikiran mereka dalam memberikan definisi tentang ekonomi pembangunan sehingga lahirlah pengertian pembangunan ekonomi yang baru yang dikemukakan oleh Micheal P Todaro dalam bukunya “ *Economics for Develepment World: An Intoduction to Participles Problem and Polecies For Dovelopment*” sebagai berikut: *Economics Develepment should there part received as a multidimensional process involving the reorganization and reorientation of entire economics and social system, it typically involves radical changes institutional social and administrative structure as well as in popular attitudes and sometimes even costoms and believe. Finally, dovelepment is usually in national contex, its widespread realization may necessitate fundamental modification of the international economic and social system*”<sup>47</sup>

Dari uraian di atas, pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasinal termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pengentasan kemiskinan yang absolut.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Micheal P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta, Erlangga, 1977), h. 87.

<sup>48</sup> *Kemiskinan absolut* adalah jumlah masyarakat yang hidup di bawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

## 2. Pembangunan Ekonomi Islam

Kata pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses atau cara tumbuh, bertambah dan berkembang, bertambah dan menjadi banyak, atau menumbuh-kembangkan segala sumberdaya yang tersedia agar bertambah menjadi banyak, namun dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan pembangunan berarti perubahan<sup>49</sup>. Tetapi dalam pandangan islam perubahan bukanlah segalanya, terdapat bagian-bagian lainnya seperti hukum tentang alam, tentang fiskal dan juga moral yang tidak berubah. Umat islam yakin bahwa ada sebagian sistem kehidupan yang tidak berubah juga bukan merupakan pelaku (subjek) modernisasi. Konsep pembangunan ekonomi islam lebih bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi seperti yang ditegaskan oleh Kursyid meliputi aspek moral, sosial, material dan spiritual. Disamping itu pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, menghapus riba dan mewajibkan zakat.<sup>50</sup>

Menurut Mahrusy dalam tulisan Almizan, pembangunan ekonomi yang dimaksud dalam islam adalah *“The process of alleviating proverty and provision of ease, comfort and decency in life”* (proses untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam penegrtian ini maka pembangunan ekonomi menurut

<sup>49</sup> PJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PWP, 2008), h. 134.

<sup>50</sup> Kursyid Ahmad, *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah fi ithorin islamiyin*, terjemahan rafiq al misri, (majalah abhas al-iqtisod al-islami, nomor 2, bagian 2), h. 46.

Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitati dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat, keduanya menurut Islam menyatu secara integral dan saling mempengaruhi.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Hasan dalam tulisan Almizan, memaparkan bahwa Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja penuh, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepeduliam terhadap alam.<sup>52</sup>

Perspektif lain dikemukakan oleh Muhammad dalam buku Djojohadikusumo, dengan menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun, bahwa pembangunan ekonomi yang ideal adalah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat manusia (*basic needs*) dan Dematerialisasi. Sebaliknya, fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan keserakahan ekonomi adalah indikator awal kejatuhan sebuah peradaban. Pada dasarnya dalam ekonomi pembangunan islam, bahwa apapun kondisi masyarakat terkait dengan soal sejahtera adalah pilihan yang diambil masyarakat bersangkutan. Meskipun kajian tentang masyarakat sejahtera cukup luas jika dilihat sesuai konsep peradaban islam saat ini, namun secara garis besar dapat diungkap secara singkat bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, masyarakat

---

<sup>51</sup> Almizan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume. 1, Nomor. 2 (Juli-Desember 2016). h. 204.

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 205

selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan dengan menggunakan berbagai pendekatan.<sup>53</sup>

Menurut Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of National* bahwa sejahtera dapat diukur berdasarkan seberapa besar hasil barang serta jasa yang diproduksi dan dikonsumsi. Karenanya yang disebut dengan istilah wilayah maju adalah yang menikmati pendapatan tinggi tanpa memperlihatkan tingkat kemunduran nilai-nilai spiritual masyarakatnya, sedangkan wilayah terbelakang adalah wilayah yang berpendapatan rendah. Pembangunan secara umum merupakan sasaran yang amat penting bagi setiap negara. Namun dunia modern hanya mengenal dua kutub teori pembangunan ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme. Hal ini juga mewarnai sistem ekonomi dunia muslim saat ini, ketimbang pengaruh islam.<sup>54</sup>

### 3. Dasar Hukum Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Hukum Syara' mengistimbatkan tentang membangun ekonomi, para penulis muslim terlebih dahulu mengkategorisasikan bahwa membangun ekonomi merupakan perbuatan terpuji karena di dalamnya terdapat maslahat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendorong penganutnya untuk membangun ekonomi dan menjadi kewajiban pemerintah. Pendapat tersebut

---

<sup>53</sup>Djojohadikusumo, Sumitro, *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 197.

<sup>54</sup>Manna, Muhammad A, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Jakarta: Intermedia, 2012), h. 81.

mengacu pada pendapat syariat Islam yaitu menarik Maslahat dan menolak Mafsadah “*Jalbu al-masalih wa dar’u al-mafasid*” dan ini terdapat dalam pembangunan ekonomi. Atas dasar ini mereka menetapkan hukum membangun ekonomi menjadi perbuatan *al-wujub*. *Dunya* misalnya mengatakan bahwa membangun ekonomi merupakan kewajiban yang sacral “*fardun muqqadas*” dan bersifat keagamaan.<sup>55</sup>

Terdapat beberapa firman Allah SWT yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi salah satunya ada dalam firman Allah QS. Al-An’aaam [6] ayat 99 dalam ayat ini ditegaskan bahwasannya Allah SWT telah menyediakan sumber daya alam yang berlimpah dan terdapat manfaat di dalamnya:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ قِنَوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu

<sup>55</sup> *Op.cit*, h. 135.

ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (QS. Al-An'aam : 99)".<sup>56</sup>

Kemudian manusia dituntut untuk sadar bahwa Allah menciptakan sumberdaya alam untuk dimanfaatkan dan dikelola dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik secara lahiriyah dan batiniah, termaksud untuk pemenuhan khususnya kebutuhan ekonomi agar terciptanya peningkatan kesejahteraan. Seperti yang telah diterangkan Allah SWT dalam surat An-Nahl [16] ayat 69:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ  
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan” (QS An-Nahl: 69).<sup>57</sup>

#### 4. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Teori ekonomi konvensional setidaknya memperkenalkan dua hal fundamental berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Pertama memperbaiki tingkat pendapatan riil individu. Kedua, menegakan keadilan distribusi pendapatan. Dua tujuan tersebut menjadi fokus pembicaraan dikalangan penulis muslim. Namun sebagian mereka menambahkan tujuan

<sup>56</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkeleema, 2009), h. 140.

<sup>57</sup> *Op.Cit*, h. 274.

lain yang menjadi karakteristik masyarakat muslim. Quhaf dalam karyanya mengatakan tujuan pembangunan ekonomi untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera secara material.<sup>58</sup> Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang memiliki karakteristik islami harus dapat meningkatkan komitmen umat islam terhadap agamanya. Al-Rubi mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya, tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agama mereka.<sup>59</sup>

Menurut Yusuf Ibrahim, tujuan pembangunan ekonomi untuk merubah masyarakat sehingga mendapat Ridho Allah Swt.<sup>60</sup> Kursyid menambahkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk merealisasikan desentralisasi. Sedangkan menurut Siddiqi tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan keseimbangan dan memperbaiki peradaban<sup>61</sup>.

## 5. Arah dan Strategi Pembangunan

Presepsi para ahli ekonomi untuk merumuskan arah dan strategi pembangunan nampaknya telah mengalami pergeseran. Pada awalnya strategi pembangunan ekonomi menitikberatkan pada konsep *Big-Push* (dorongan

---

<sup>58</sup> Athif Ajwah, *Mahfum al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-fikr al-Iqtisodi al-Islami*, dalam majalah al-Iqtisod wa al-Idarah, (Jeddah: Markaz al-Buhus wa al-tanmiyah, 1985), h. 5.

<sup>59</sup> Mahmud Al-Rubi, *Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima'iyah* dalam majalah Al-Tijjariyah wa al-Islamiyah, nomor 3, Tahun 1984, h.31.

<sup>60</sup> Yusuf Ibrahim, *Istiratijiyatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah al-Islam* (Kairo: Al-Ittihad al-Dauli al-Bunuk al-Islamiyah, 1981), h. 221.

<sup>61</sup> *Op.Cit*, h. 59.

besar), *take off* (lepas landas), *leaf-forward* (lompatan kedepan), *unbalanced growth* (pembangunan tak seimbang), *linkage* (kaitan), *growth inducing mechanism* (mekanisme yang mendorong pertumbuhan), *commercial point* (orientasi komersial), *disguised unemployment* (pengangguran tak kentara). Strategi tersebut telah semakin berkurang, karena strategi ini ternyata sangat tidak memuaskan. Strategi pembangunan yang demikian telah menimbulkan ketimpangan ekonomi, kelebihan kapasitas produksi, kepadatan perkotaan, pengangguran dan stagnasi pedesaan.

Dewasa ini telah bergeser pada strategi pembangunan yang baru yang menitikberatkan kepada *integrated rural development* (pembangunan pedesaan yang terpadu), *agricultural intensification* (intensifikasi pertanian), *intermediate technology* (teknologi madya), *appropriate education* (pendidikan yang layak), *labor force expansion* (ekspansi tenaga kerja), *small industries and export promotion* (promosi industri kecil dan ekspor), *employment generation* (penciptaan lapangan kerja), *nutrition and health development* (perbaikan gizi dan kesehatan), *social and human resources development* (pengembangan sumber daya manusia dan sosial), *income distribution* (distribusi pendapatan), dan *institutional change* (perubahan institusional).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Kwik Kian Gie, *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan : Beberapa Pendekatan Alternatif*, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 128.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi. Akan tetapi itu lebih penting dalam menentukan sasaran pembangunan, karena kebijaksanaan ekonomi yang telah berhasil akan banyak mempengaruhi kebijaksanaan non-ekonomi dan dapat dikatakan baik fisik realita maupun keadaan fikiran yang dimiliki oleh masyarakat mencakup usaha-usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi (1) kebutuhan hidup, (2) kebutuhan harga diri, (3) kebutuhan kebebasan. Menurut Todaro sasaran pembangunan yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pesediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
- 2) Menangakat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai yang manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memnuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
- 3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan social bagi semua individu nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan

ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas strategi pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada:

- 1) Meningkatkan output nyata/produktivitas yang tinggi yang terus menerus meningkat. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup.
- 3) Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan.
- 4) Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah.<sup>63</sup>

## **B. Percepatan Pembangunan Ekonomi**

Percepatan merupakan usaha untuk membuat sesuatu bergerak lebih cepat, percepatan dalam pembangunan adalah proses upaya, tindakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkordinasi dan terpadu untuk mempercepat kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Percepatan pembangunan dilakukan agar suatu lokasi dapat

---

<sup>63</sup> Todaro, Micheal P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga jilid 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 280

dioptimalkan sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi.<sup>64</sup> Setiap upaya percepatan pembangunan pasti mempunyai tujuan dari kegiatannya, yaitu untuk meningkatkan perekonomian daerah dan membuka peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.<sup>65</sup>

Upaya percepatan pembangunan disuatu daerah dalam pandangan ekonomi islam harus didasarkan pada tujuan yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia didunia dan akhirat. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan *masalah* dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (*transendental*). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, Sabda Rasulullah Saw, *ijma*, *qiyas*, maupun *ijtihad* para ulama fikih.

---

<sup>64</sup> Dina Fariani, "Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Kota Cilegon"., (Skripsi Program Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2014). h. 22.

<sup>65</sup> Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 374.

## C. Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal

### 1. Pengertian Daerah tertinggal

Berdasarkan RPJM ditetapkan dengan Perpers No.5 tahun 2010, pengertian daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal<sup>66</sup>. Ketertinggalan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) wilayah tertinggal juga pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam<sup>67</sup>.

Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain. Wilayah tertinggal dalam kerangka penataan ruang nasional didefinisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi jauh tertinggal dari rata-rata nasional, baik akibat kondisi geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya. Pengertian yang lebih umum menyebutkan bahwa wilayah tertinggal merupakan wilayah

---

<sup>66</sup> Siskarosa Ika Oktora, "Pemodelan dan Pengklasifikasian Kabupaten Tertinggal Di Indonesia Dengan Pendekatan *Multivariate Adaptive Regression Splines* (Mars)" (Online), tersedia di: [pustaka.unpad.ac.id](http://pustaka.unpad.ac.id) (14 April 2017), h. 1.

<sup>67</sup> Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, "Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Identifikasi Masalah-Masalah Ketertinggalan Kabupaten Daerah Tertinggal", (On-line), tersedia di: [www.ditjenpdt.kemendesa.go.id](http://www.ditjenpdt.kemendesa.go.id) (14 April 2017), h. 16.

pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam mengikuti dan memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah<sup>68</sup>.

## 2. Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal

Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah dasar yaitu: (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3) prasarana dan sarana (*infrastruktur*), (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, dan (6) berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar Negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik<sup>69</sup>. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 001/KEP/M-PDT/I/2005 juga menyebutkan bahwa faktor penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal yaitu antar lain :

- 1) Geografis: Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terpencil atau

---

<sup>68</sup> Abdul Wahid, "Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Study kasus: Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat". (Skripsi Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006), h. 13.

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 16

karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.

- 2) Sumberdaya Alam: Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.
- 3) Sumberdaya Manusia: Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan atau institusi yang belum berkembang.
- 4) Prasarana dan Sarana: Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
- 5) Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial: Seringnya suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.
- 6) Kebijakan pembangunan: Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan

prioritas pembangunan serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan<sup>70</sup>.

Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwa daerah tertinggal sangat kompleks dengan permasalahan-permasalahan, hal inilah yang menjadi tantangan bagi *stakeholders* dalam upaya penanganan pembangunan daerah tertinggal. Namun, sekelumit permasalahan yang dihadapi khususnya pada daerah tertinggal juga berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus pada daerah yang dimaksud, agar dalam membuat suatu strategi pembangunan daerah tertinggal dapat dirumuskan langkah-langkah yang strategis sehingga pencapaian target bisa lebih tepat pada sasaran.

### **3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal**

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program, penyelesaian wilayah tertinggal perlu menggunakan prinsip-prinsip pengembangan yaitu sebagai berikut : (a) berorientasi pada masyarakat (*people centered*) : masyarakat di wilayah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, (b) berwawasan lingkungan (*environmentally sound*) : berkembangnya kebutuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi dan modernisasi dapat mendorong terciptanya kegiatan merusak lingkungan seperti pengrusakan hutan lindung dan

---

<sup>70</sup> Keputusan Kementerian Negara Pembangunan Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang daerah tertinggal.

terumbu karang, (c) sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat (*culturally appropriate*) : pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan masyarakat perlu memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan tradisional (*traditional wisdom*) dalam kehidupan masyarakat setempat, dan memperkaya khasanah budaya bangsa, (d) sesuai kebutuhan masyarakat (*socially accepted*) : kegiatan pengembangan wilayah tertinggal harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat penerima manfaat dan bukan berdasarkan asas pemerataan dimana setiap daerah berhak atas bantuan pendanaan dari pemerintah, dan (e) tidak diskriminatif (*non discriminative*) ; prinsip ini digunakan agar kegiatan penanganan wilayah tertinggal tidak dibedakan pada kepentingan pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran program<sup>71</sup>.

Seperti yang tersirat dalam definisi wilayah tertinggal, ternyata karakteristik wilayah dan masyarakat wilayah tertinggal menunjukkan perbedaan yang cukup berarti dengan wilayah lain di Indonesia, maka pendekatan penanggulangan di wilayah tertinggal tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi tetapi sifatnya harus lebih menyeluruh dan merata pada semua aspek pembangunan. Perlu menjadi catatan bagi pemerintah daerah bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 20.

pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik negatif maupun yang positif<sup>72</sup>. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan.

Setelah ada suatu kebijakan maka perlu perumusan strategi, hal ini dimaksudkan agar setiap strategi pembangunan daerah tertinggal yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, antara kebijakan dan strategi harus menunjukkan kesinergikan sehingga setiap kebijakan dan strategi yang sudah dirumuskan dapat langsung mengenai sasaran. Strategi-strategi yang dimaksud meliputi :

- 1) Pengembangan ekonomi lokal : strategi ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui pemerintahan daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada.

---

<sup>72</sup> Abdul Wahab. Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 51

- 2) Pemberdayaan masyarakat : strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
- 3) Perluasan kesempatan : strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju.
- 4) Peningkatan kapasitas : strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal.
- 5) Peningkatan Mitigasi dan Rehabilitasi : strategi ini diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam.

Bertolak dari konsep strategi pengembangan kawasan di kabupaten yang tertuang dalam laporan perencanaan dan pengendalian strategi pengembangan kawasan tertinggal, maka konsep rencana strategi nasional pengembangan kawasan tertinggal pada masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi suatu acuan kerja dan pedoman strategi pembangunan yang di dasarkan atas lima strategi dasar yaitu :

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic Needs Development*)
- 2) Berpusat pada manusia (*People Centered Development*)
- 3) Pertumbuhan sekaligus pemerataan (*Redistribution With Growth*)

4) Partisipatif (*Participation Approach*)

5) Keberlanjutan (*Sustainable Development*)<sup>73</sup>

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh adanya sektor basis. Penempatan kriteria pertumbuhan sebagai dasar penetapan kawasan adalah relevan dengan teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux. Pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Menurut Perroux, dalam tulisan Sjafrizal kota merupakan suatu tempat sentral sekaligus kutub pertumbuhan. Artinya, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat terutama daerah perkotaan yang di sebut sebagai pusat pertumbuhan dengan instensitas berbeda. Dilain pihak diungkapkan bahwa industri unggulan merupakan penggerak utama pembangunan daerah sehingga dimungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah, sehingga perkembangan industri suatu daerah berpengaruh dalam perkembangan daerah lainnya.<sup>74</sup>

Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat menurut Todaro (2000) yaitu; (1) Akumulasi modal, meliputi semua investasi baru pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, (2) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, (3) Kemajuan teknologi. Lebih

---

<sup>73</sup> *Op.Cit*, h. 24

<sup>74</sup> Sjafrizal, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, (Jakarta: Jurnal Buletin Prisma, 1997), h. 85.

lanjut diungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah daya dukung ekonomi di dalam daerah seperti sumber daya manusia, investasi, sumber daya alam, sarana dan prasarana penunjang aktivitas. Sedangkan faktor eksternal yang merupakan kekuatan dari luar adalah campur tangan pemerintah yang diimplementasikan dalam penyaluran dana pembangunan melalui dana inpres dan dana bentuk lain pada daerah atau sektor yang diprioritaskan.

#### **D. Konsep Manajemen Strategi**

Memformulasikan strategi merupakan rangkaian kegiatan yang membutuhkan perhatian yang serius. Penggalan informasi dari pihak-pihak yang kompeten dalam suatu daerah merupakan langkah pertama dan kunci untuk menghasilkan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan suatu daerah. Menurut Purnomo Setiawan strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *General Ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang<sup>75</sup>. Kata strategi dalam kegiatan berperang bukanlah suatu yang asing karena strategi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pemakaian sumber daya didalam

---

<sup>75</sup> Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), h. 8.

kendala iklim kompetitif agar seperangkat sasaran dapat dipakai. Strategi sendiri digunakan dalam dua pengertian yaitu untuk menunjukkan kepada apa yang mau dilakukan oleh suatu organisasi secara aktif atau untuk menggambarkan reaksi positifnya terhadap perubahan lingkungan. Istilah strategi yang dipakai dalam studi berarti pengetahuan dan seni menangani sumber-sumber yang tersedia dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan.

Menurut Fred R. David (2004), Manajemen Strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya<sup>76</sup>. Menurut Husein Umar (1999), Manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan- keputusan startegis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang<sup>77</sup>.

Lawrence R. Jauch dan Wiliam F. Gluech (Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, 1998), menyatakan dalam tulisan Toufiqurokhan bahwa Manajemen Strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategis adalah cara dengan jalan mana para pencari strategi menentukan sasaran dan pengambilan

---

<sup>76</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategis: Konsep. Edisi-7*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2004). h. 5

<sup>77</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran.* ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 86

keputusan<sup>78</sup>. Wheelan dan Hunger (*Strategic Manajemen and Business Policy Massachuset*, 1995) : Manajemen strategik adalah suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang<sup>79</sup>. A. Bakr Ibrahim dan Kamal Arghyed mendefinisikan *Strategik Manajemen* sebagai berikut:

*“Strategic Management is the systematic and continuous process of selecting, implementing, and evaluating strategic choices. These decisions must be congruent with the organization’s mission, objective, and internal and external capabilities, for they will set the tone for the entire organization”<sup>80</sup>.*

Kata kunci dalam ungkapan di atas tidak terlepas dari kata *strategy* itu sendiri, misi, objektif, serta kapabilitas internal dan eksternal. Proses manajemen strategis menuntut para manajer untuk memeriksa dan mengontrol situasi lembaga atau perusahaannya secara periodik, mengevaluasi misi dan tujuannya, menilai lingkungan eksternalnya ditinjau dari sudut situasi ekonomi, perubahan struktur, kompetisi, inovasi teknologi di samping menilai kemampuannya ke dalam, seperti sumber daya manusianya, kualitas produksi atau luarannya, keterampilan dan teknik-teknik pemasarannya serta performan keuangan.

Manajemen strategik berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan strategi dan perencanaan, dan bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam

---

<sup>78</sup> Iwan Purwanto, *Manajemen Strategi, Cet-1* ( Bandung: Yrama Widya, 2007), h. 75.

<sup>79</sup> Toufiqrokhman, *Manajemen Strategi* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016), h. 15

<sup>80</sup> Azhar Arsyad, *Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan & Eksekutif, Manajemen Strategik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 26.

praktek. Manajemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga macam elemen utama. Terdapat adanya *analisis strategik* dimana penyusun strategi yang bersangkutan berupaya untuk memahami posisi strategik organisasi yang bersangkutan. Terdapat pula adanya pilihan strategik yang berhubungan dengan perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasi, dan pilihan antara mereka. Akhirnya terdapat pula *implementasi strategi* yang berhubungan dengan merencanakan bagaimana pilihan strategi dapat dilaksanakan.

Adapun fokus manajemen strategik adalah pada lingkungan eksternal dan pada operasi-operasi pada masa datang. Manajemen strategik mendeterminasi arah jangka panjang organisasi yang bersangkutan dan menghubungkan sumber-sumber daya organisasi yang ada dengan peluang-peluang pada lingkungan yang lebih besar<sup>81</sup>. Menurut Fred R. David (2004), terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam manajemen strategik yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan Strategi : meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan
2. Pelaksanaan strategi : Mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan.

---

<sup>81</sup> Nisjar, Karhi, Winardi, *Manajemen Strategik*, (Bandung:Mandar Maju, 1997), h, 85.

3. Pelaksanaan strategis : mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi.
4. Evaluasi strategi : Tahap ini merupakan tahap akhir dari manajemen strategik. Tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah : Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Kemudian mengukur kinerja, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok.

Proses manajemen strategi bersifat dinamis dan berkelanjutan. Suatu perubahan dalam salah satu komponen utama dalam model dapat memaksa perubahan dalam salah satu atau semua komponen yang lain. Oleh karena itu, aktivitas merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi harus dilaksanakan secara terus-menerus. Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat harus melakukan tindakan manajemen strategi sebagai upaya untuk memperoleh suatu rumusan-rumusan strategi dalam pembangunan daerah tertinggal. Perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan karena pada kondisi ini akan ditentukan apa yang menjadi tujuan dan apa saja yang harus dilakukan dalam pencapaiannya. Pengalokasian sumberdaya harus

dilakukan agar efisien dan efektif. Di samping itu, pemerintah setempat juga harus memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai landasan dalam memformulasikan strategi agar serangkaian tindakan yang harus diambil dan dilakukan memperoleh sasaran yang tepat.

## E. Analisis SWOT

### 1. Definisi Analisis SWOT

SWOT merupakan akronim dari *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan) internal dari suatu perusahaan serta *Opportunities* (peluang) dan *Threat* (ancaman) lingkungan yang dihadapinya. Analisis SWOT (*SWOT analysis*) merupakan teknik historis yang terkenal dimana para *stakeholders* membentuk gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis daerah. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari “kesesuaian” yang baik antara sumber daya internal (kekuatan dan kelemahan) dengan situasi eksternal (peluang dan ancaman). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.<sup>82</sup>

**Peluang** (*opportunity*) merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan daerah. Tren utama merupakan salah satu sumber peluang. Perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan

---

<sup>82</sup> John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., *Edisi 10 Strategic Management (Manajemen Strategis) Formula, Implementasi, dan pengendalian*, (Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2002), h. 200.

investor dapat menjadi peluang bagi suatu daerah untuk berkembang. **Ancaman** (*threat*) merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu daerah. Ancaman merupakan penghalang utama bagi suatu daerah dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, perubahan teknologi, dan direvisinya atau pembaruan peraturan dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan. **Kekuatan** (*strength*) merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu daerah yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi daerah tersebut.

**Kelemahan** (*weakness*) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu daerah relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan suatu daerah untuk berkembang.<sup>83</sup>

#### a. Manfaat analisis SWOT

Metode analisis SWOT merupakan metode analisis yang paling dasar dalam melakukan analisis strategi, yang bermanfaat untuk mengetahui suatu permasalahan ataupun suatu topik dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisis ini biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah kekuatan dan untuk menambah keuntungan suatu organisasi dari segi peluang yang ada,

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 201.

sambil mengurangi kekurangan yang dimiliki dan juga menghindari berbagai ancaman yang terjadi.

Jika digunakan dengan baik dan benar, maka analisis ini akan dapat digunakan untuk membantu melihat sisi-sisi yang terabaikan atau tidak terlihat dari sebuah daerah atau wilayah. Dari uraian diatas, analisis SWOT adalah instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi dalam manajemen suatu organisasi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi.<sup>84</sup>

## **b. Tujuan, dan Fungsi Analisis SWOT**

### **1) Tujuan Analisis SWOT**

Analisis SWOT mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan pembangunan suatu daerah.<sup>85</sup> Maka perlunya identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah tersebut melalui telaah terhadap lingkungan dan potensi sumber daya

---

<sup>84</sup> Faisal Hafid, Analisis SWOT Terhadap Pelayanan Pasien Rawat Jalan Ditinjau Dari Etika Kerja Islam (Studi pada RSUD Kota Agung), Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan Lampung, 2016, h. 38

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 38

alam dalam menetapkan sasaran dan merumuskan strategi yang realistis dalam mewujudkan misi dan misinya.

Berdasarkan definisi di atas maka tujuan analisis SWOT adalah untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah di analisis. Apabila terdapat kesalahan, agar daerah itu harus mengelola untuk mempertahankan serta memanfaatkan peluang yang ada secara baik begitu juga pihak pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kekuatan serta mengatasi ancaman menjadi peluang.

## 2) Fungsi Analisis SWOT

Fungsi dari analisis SWOT adalah untuk menganalisa mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal perusahaan.

### c. Keunggulan Analisis SWOT

Berikut adalah keunggulan dari analisis SWOT antara lain:

- 1) Dapat dijadikan panduan dalam penyusunan kebijakan strategis menuju Visi yang telah di canangkan sebelumnya.
- 2) Dapat membantu memudahkan proses evaluasi berkaitan dengan penentuan kebijakan strategis sekaligus sistem perencanaan agar meraih kesuksesan dari waktu sebelumnya.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 40

- 3) Dapat dijadikan bagian penting untuk memperoleh informasi tentang beragam hal yang dibutuhkan menuju proses perubahan perbaikan masa mendatang.
- 4) Dapat meningkatkan motivasi dalam menemukan ide-ide kreatif untuk terus maju meraih kesuksesan yang ditargetkan sebelumnya.

**d. Keterbatasan Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan pendekatan konseptual yang sangat luas, sehingga rentan terhadap beberapa kelemahan utama.

- 1) Analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal.
- 2) Analisis SWOT dapat bersifat statis dan berisiko mengabaikan kondisi yang berubah.
- 3) Analisis SWOT dapat terlalu menekankan pada satu kekuatan atau elemen strategi.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 206.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DAERAH

#### A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012<sup>88</sup>. Wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 wilayah kecamatan, yang diantaranya yaitu: Bengkunt Belimbing, Bengkunt, Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong dan Pulau Pisang<sup>89</sup>.

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Pesisir Barat perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk,

---

<sup>88</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Pesisir Barat Tahun 2015, *Op.Cit.* h. 9.

<sup>89</sup> BPS Lampung Barat, *Op.Cit.* h. 8.

komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Pesisir Barat.

### **1. Aspek Geografi**

Gambaran umum pada aspek geografis akan menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Barat<sup>90</sup>.

#### **a. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terletak di ujung bagian Barat Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai Samudera Hindia dengan letak wilayah bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat, wilayah bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan wilayah bagian barat merupakan garis pantai Samudera Hindia. Kabupaten Pesisir Barat Letak administratif ini menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai lalu lintas penghubung antara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu -Kabupaten Pesisir Barat - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Tanggamus.

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas  $\pm 2.907,23$  Km<sup>2</sup> atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, memiliki garis pantai 221,5 Km (Daratan dan garis pulau – pulau) dan garis pantai daratan 210 Km

---

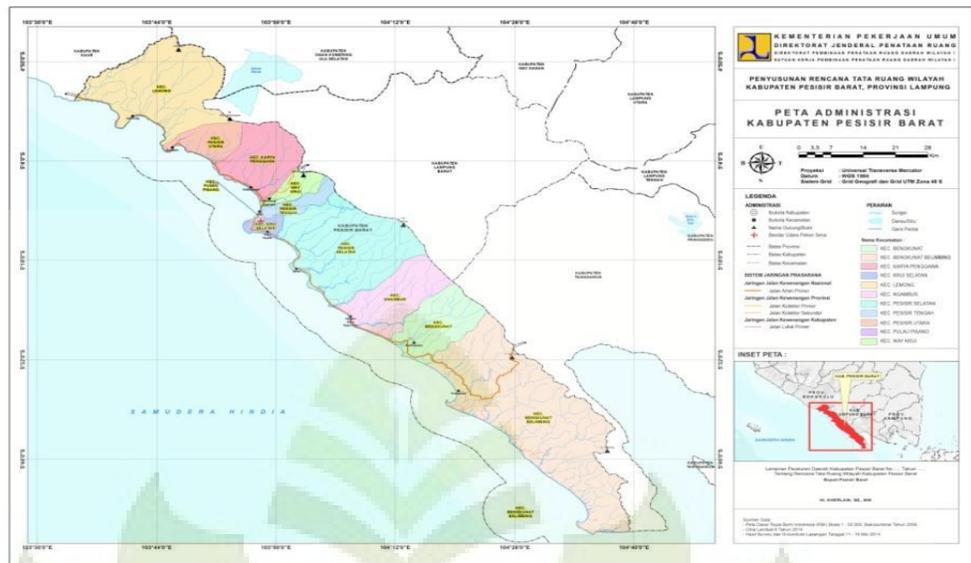
<sup>90</sup> Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), *Op.Cit*, h. 37

dengan jumlah penduduk sebesar  $\pm$  156.276 jiwa dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Bengkunt Belimbing dengan luas 943,70 Km<sup>2</sup> dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Krui Selatan dengan luas 36,25 Km<sup>2</sup>.

Tabel 3.1  
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Pesisir Selatan	409,17	14,07
2	Pesisir Tengah	120,64	4,15
3	Pesisir Utara	84,27	2,9
4	Karya Penggawa	211,11	7,26
5	Lemong	454,97	15,65
6	Bengkunt	215,03	7,4
7	Ngambur	327,17	11,25
8	Bengkunt Belimbing	943,7	32,46
9	Way Krui	40,92	1,41
10	Krui Selatan	36,25	1,25
11	Pulau Pisang	64	2,2
<b>Jumlah</b>		<b>2.907,23</b>	<b>100,00</b>

Sumber: *Pesisir Barat Dalam Angka, 2013*



Sumber: Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, 2015

Gambar 3.1

### Peta Administratif Kabupaten Pesisir Barat

Posisi Kabupaten Pesisir Barat sebagai lalu lintas melalui jalur darat lintas merupakan potensi pengembangan di sektor perdagangan, jasa, dan transportasi. Posisi Kabupaten Pesisir Barat yang berada pada garis pantai Samudera Hindia merupakan potensi disektor perikanan dan kelautan dan pengembangan sektor pariwisata yang dapat diandalkan untuk tingkat lokal maupun Internasional. Hal ini selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yang tercantum pada Misi 1 yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah” yang pada penjabarannya difokuskan untuk pengembangan pariwisata unggulan Provinsi Lampung dan juga selaras dengan tema

pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 yaitu *“Percepatan Peningkatan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Pengembangan Pariwisata dan Energi”*.

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru berusia 3 (tiga) Tahun berjalan Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat bersaing dengan kabupaten lain dan dapat menjadi kabupaten yang mandiri dengan melakukan percepatan pembangunan dan menggali potensi-potensi lain selain pertanian dan perikanan melalui pengembangan potensi di sektor perkebunan, kehutanan, perdagangan, jasa, dan pariwisata tentunya dengan perencanaan yang baik agar upaya pengembangan dan pembangunan dapat berkelanjutan.

#### **b. Letak Kondisi Geografis**

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kota strategis yang berada di ujung bagian Barat Provinsi Lampung yang terletak pada koordinat :4°, 40', 0" - 6°, 0', 0" Lintang Selatan dan 103°, 30', 0" - 104°, 50', 0" Bujur Timur. Kabupaten Pesisir Barat memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Provinsi Lampung dengan Provinsi lain yaitu Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan dan merupakan jalur lintas darat alternatif Provinsi-provinsi di sebelah barat Sumatera yang akan ke Pulau Jawa. Selain sebagai jalur lintas darat alternatif Kabupaten Pesisir Barat juga menjadi penghubung jalur lintas udara bagi pesawat-pesawat perintis melalui Bandara Seray Kabupaten Pesisir Barat. Sebagai

Kabupaten yang sebagian besar wilayah selatannya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia potensi pengembangan jalur laut dapat dilakukan. Penggunaan kembali dan perbaikan pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat seperti Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Kuala Stabas perlu dilakukan sebagai penambahan jalur alternatif akses dari dan menuju wilayah-wilayah lain.

### c. Geologi

Sedangkan berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989), Pesisir Barat terdiri dari batuan vulkan tua (*Old QuarternaryYoung*), Formasi Simpang Aur, Formasi Ranau, Formasi Bal, Batuan Intrusive.

#### 1) Peratambangan

Mengingat geologi wilayah Pesisir Barat cukup kompleks menyebabkan keanekaragaman endapan mineral/bahan galian sebagai potensi alam yang sangat bermanfaat bagi pembangunan. Sebaran bahan galian golongan A (strategis) yang diperkirakan ada yaitu Batubara dan Radio aktif, tetapi masih perlu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut. Bahan galian golongan B yang ada yaitu Emas, Perak, Timbal, Tembaga, Seng, Belerang, Pasir Besi, Mangan dan sebagainya masih perlu penelitian secara mendetail. Bahan galian golongan C meliputi Batu apung, Tufa, Perlit, Tras, Batuan Beku, Batu Gamping, Marmer, Pasir, Krakas, Diatom, Kaolin, Tanah Liat

dan sebagainya. Pengusahaan bahan galian ini masih diusahakan pada skala kecil atau rumah tangga. Beberapa potensi sumberdaya pertambangan yang sudah dimanfaatkan seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.2  
Potensi Sumberdaya Pertambangan Di Kabupaten Pesisir Barat

No	Potensi	Produksi	Desa	Kecamatan
1	Pasir	2.314 <sup>3</sup>	Tulung Bamban	Pesisir Tengah
2	Batu Andesit	1.215 <sup>3</sup>	Tebakak	Karya Penggawa
			Kota Jawa	Bengkunat Belimbing
3	Pasir Besi	25.613 <sup>3</sup>	Lemong	Lemong
			Baturaja	Pesisir Utara
			Pelita Jaya	Pesisir Selatan
			Malaya	Lemong
			Bandar Pugung	Lemong

Sumber: *BPS Lampung Barat, 2013*

## 2) Energi

Daerah Pesisir Barat cukup kaya akan berbagai sumber daya energi seperti gas bumi/panas bumi, tenaga air (air terjun, air deras dan gelombang laut, tenaga angin dan sebagainya). Perlu diadakan penelitian dan pengembangan lebih lanjut sumber energi tersebut agar dapat digunakan sebagai energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Pada Tabel 3.4 menunjukkan pemanfaatan energi alternatif sebagai sumber listrik.

Tabel 3.3  
Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH)  
Di Kabupaten Pesisir Barat

Sumber Energi	Produksi	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
Pembangkit Listrik Tenaga Hydro (PLTMH)	3.22 MW	Tanjung Rejo	Bengkunat Belimbing
	2-2.5 MW	Way Ngambur	Bengkunat
	2-2.5 MW	Way Tembulih	Ngambur
	69 KW	Ulok Mukti	Ngambur
	4.57 MW	Way Simpang Kanan, Laay	Karya Penggawa
	8-20 MW	Way Simpang Kiri, Laay	Karya Penggawa
	7.21 MW	Way Simpang Balak	Pesisir Utara
	3.81 MW	Way Simpang Lunik	Pesisir Utara
	1.25 MW	Khampang Kota Karang	Pesisir Utara
	2-2.5 MW	Way Malaya	Lemong
	4.20 MW	Way Melesom	Lemong
	2.13 MW	Way Halami	Lemong

Sumber: *BPS Lampung Barat 2013*

#### d. Hidrologi

Wilayah Pesisir Barat di bagian barat mempunyai sungai-sungai yang mengalir pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan daerah ini ditandai dengan jarangya banjir sebab pada saat musim hujan datang bersamaan air tidak terkonsentrasi dan timing lagnya menjadi lambat. Delta marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial vulkanik, hal ini menyebabkan bila air besar muara sungai sering

berpindah (*meander*). Sungai-sungai yang berukuran pendek dan mengalir di lereng terjal seperti ini sukar dikembangkan untuk irigasi, kecuali yang sudah mengalir di daerah delta pantai, umumnya mudah dikembangkan walaupun masih terkena pengaruh pasang surut laut.

**e. Cagar Budaya dan Cagar Alam**

Disekitar jalan Krui merupakan perkampungan penduduk. Bangunan perumahan merupakan arsitektur Lampung, sebagian kecil telah mengalami perubahan dari aslinya. Untuk itu perlu mendapat perhatian sehingga ciri khas daerah dapat dipertahankan dan tetap lestari, juga daerah Lombok dan Suka Banjar merupakan perkampungan tua, dengan rumah khas Lampung tetapi dengan tata letak yang berbeda. Adanya Mitos "Keramat Manula" yang terletak antara Rata Agung sampai Air Manula (berjarak 2 km dari jalan ke arah pantai, masuk melalui pinggir Way Sahung) menyebabkan kawasan relatif aman dari gangguan. Keramat ini berbentuk makam yang sering dikunjungi oleh penduduk sekitarnya. Perlu adanya pendataan cagar-cagar budaya lain yang belum terpublikasi dan perlu adanya pelestarian sebagai budaya dan kearifan lokal.

**f. Penggunaan Lahan**

Kabupaten Pesisir Barat lebih dari 60% luas wilayahnya adalah kawasan hutan lebat yang merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 192.575 Ha, Hutan Lindung Pesisir 9.360 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 33.358Ha (31.86%), Hutan Bakau 10.298,

hal ini menunjukkan Kabupaten Pesisir Barat mempunyai peranan penting sebagai Daerah Tangkapan air (*catchment area*), paru paru bagi provinsi Lampung bahkan dunia, sebagai wilayah konservasi ekosistem Hutan Tropis salah satunya adalah Harimau Sumatera.

Dari luas lahan secara keseluruhan di Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan tahun 2015, terdiri dari lahan untuk penggunaan Tanah Sawah (Rawa) sekitar 8.478 Ha dan Tanah Bukan Sawah (Tanah Kering) sekitar 209.016 Ha dan Lahan Pasang Surut/Irigasi 4.639 Ha. Adapun luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian sampai tahun 2014 sebesar 19.788 Ha atau 5.76 persen dari seluruh luas tanah di Kabupaten Pesisir Barat. Rincian untuk penggunaan lahan pertanian adalah tanah sawah sebesar ±8.594 Ha (51,30% dari luas lahan pertanian), Perkebunan 28.938 Ha, Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 192.575 Ha, Hutan Lindung Pesisir 9.360 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 33.358Ha (31.86%), Hutan Bakau 10.298, Padang Pengembalaan/Rumput 171 Ha, dan Lahan Terlantar yang tidak diusahakan 11.453 Ha. Besarnya potensi lahan pertanian belum diimbangi dengan produktifitasnya, produktifitas lahan pertanian baru mencapai rata – rata 4,50 Ton gabah kering/Ha/Tahun dimana produksi tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya produktifitas tersebut salah satu kendalanya adalah masih kurangnya fasilitas irigasi teknis dan rendahnya penerapan teknologi

pertanian serta seringnya terjadi kelangkaan pupuk pada saat dibutuhkan.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4  
Luas Tanah (Ha) Menurut Penggunaan Di Kabupaten Pesisir Barat

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Sawah Irigasi	4.639 Ha
2	Tadah Hujan	209.016 Ha
3	Rawa	8.478 Ha
4	Lainnya (folder, rembesan dll)	136 Ha
5	Tegalan/Kebun	15.962 Ha
6	Ladang / Huma	7.596 Ha
7	Perkebunan	28.938 Ha
8	Padang Penggembalaan/Rumput	171 Ha
9	Lahan Terlantar Tidak Diusahakan	11.453 Ha
10	Hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)	192.575 Ha
11	Hutan Lindung Pesisir	9.360 Ha
12	Hutan Produksi Terbatas	33.358 Ha

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat, 2014

#### g. Potensi Pengembangan Wilayah

Faktor-faktor yang merupakan daya dukung Kabupaten Pesisir Barat, dan yang menjadi potensi bagi pengembangan Kabupaten Pesisir Barat diakomodasikan pada Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat dan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Pesisir Barat tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016. Pesisir Barat Sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dari berbagai sektor seperti Pertanian, Perikanan Laut/tangkap, Perkebunan Pariwisata dan

perdagangan dan jasa. Dari semua sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sektor Jasa, Perdagangan dan Pengembangan Pariwisata yang paling memungkinkan untuk meningkat. Potensi pengembangan wilayah juga sangat mungkin di berbagai sektor terutama sektor-sektor yang mendukung keadaan wilayah dan kearifan lokal Kabupaten Pesisir Barat.

#### **h. Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana. Kabupaten Pesisir Barat dengan karakteristik wilayah tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana alam dengan dominasi bencana Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Gempa dan Kebakaran Hutan akibat Kekeringan. Bila ditelaah lebih jauh, Kelima macam bencana di Kabupaten Pesisir Barat ini saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan, perusakan lingkungan dan perambahan Hutan. Pengembangan kawasan di daerah kawasan rawan bencana perlu ada pengkajian dan penelitian yang akurat agar tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan alam lebih jauh. secara umum Kawasan Rawan Bencana diklasifikasikan menjadi:

##### **1) Kawasan Pesisir Pantai**

Untuk Kabupaten Pesisir Barat kawasan yang berpotensi tinggi sebagai kawasan rawan bencana adalah daerah garis pantai yang

merupakan kawasan rawan bencana Tsunami, luas kawasan rawan bencana Tsunami  $\pm 25.283$  Ha meliputi 11 wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dan merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (*Mean Sea Level, MSL*), dan menjadi tempat bermuaranya sungai-sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat menerima dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat dari badai angin topan atau gempa yang menyebabkan tsunami.

## 2) **Kawasan Dataran Banjir (*Flood Plain Area*)**

Adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar. Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kabupaten Pesisir Barat memiliki  $\pm 12$  Daerah Aliran Sungai (DAS) pendek yang langsung bermuara ke laut. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di bagian hilir sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Daerah Sempadan Sungai seringkali merupakan daerah pengembangan kota, seperti permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Kawasan ini memiliki

potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang air laut.

### **3) Kawasan Pegunungan dan Perbukitan**

Secara Topologi Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki kawasan berpotensi mengalami bencana tanah longsor terutama daerah-daerah yang berbukit dan berada di lereng-lereng gunung. Daerah lereng pegunungan dan perbukitan secara umum memiliki struktur tanah yang tidak stabil ini dapat menimbulkan bencana tanah longsor, apalagi pemanfaatan pengembangan budidaya pemukiman, pertanian, perkebunan dan lainnya tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Pemicu adanya bencana tanah longsor umumnya disebabkan oleh gempa dan curah hujan yang tinggi dan dapat diperparah jika terjadi perusakan lingkungan seperti penggundulan hutan di kawasan pegunungan dan perbukitan.

#### **i. Kawasan Budidaya**

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat saat ini sedang menyusun Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pengembangan kawasan yang berkelanjutan. Sebagai perwujudan perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pengembangan kawasan budidaya (pemukiman, Perkantoran, Industri, dan Pertanian)

tidak merusak kultur dan lingkungan yang ada. Setelah tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan pengembangan wilayah di Kabupaten Pesisir Barat dapat terarah dan merata di setiap unit wilayah kabupaten pesisir barat sehingga dapat meratakan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.

### **1) Kawasan Permukiman**

Pengembangan kawasan permukiman menyebar di seluruh unit lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Secara eksisting perumahan di Kabupaten Pesisir Barat masih belum terlalu padat kecuali di kawasan perniagaan, kawasan pemerintahan dan disepanjang jalan arteri. Dengan semakin berkembangnya suatu daerah tentu kebutuhan lahan permukiman akan semakin bertambah juga. Penataan kawasan permukiman harus dilakukan sejak awal, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur pengembangan kawasan permukiman untuk kelangsungan keseimbangan alam, keamanan dari bencana, tidak merusak lingkungan dan lahan – lahan produktif yang ada.

### **2) Kawasan Perdagangan/Jasa**

Selama tahun 2009–2014 perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian. Sedangkan perdagangan selama tahun 2009–2014 merupakan penyumbang kedua PDRB Kabupaten Pesisir Barat yaitu rata-rata sebesar 14-16 persen

atas dasar harga berlaku, untuk sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang relatif tetap. Besaran kontribusi tersebut terutama ditentukan oleh besarnya peran aktif sektor swasta dalam mendukung pengembangan perekonomian, walaupun kinerja belum mencapai optimal. Kawasan perdagangan di Kabupaten Pesisir Barat terpusat berada di pasar-pasar yang ada di setiap kecamatan dan merupakan pasar besar (pasar kota).

Kondisi saat ini sebagian besar pemerintah desa kurang berdaya dalam mengelola aset desa, hal ini disebabkan keterbatasan kewenangan yang dimiliki sehingga pada akhirnya pemerintah desa dan masyarakat belum dapat memanfaatkan secara optimal semua aset yang ada untuk membangun perekonomian desa. Oleh karenanya, dengan adanya kemauan dan keinginan yang kuat masyarakat di perdesaan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya serta adanya komitmen dan dukungan keberpihakan semua pihak-pihak yang berkompeten terhadap pemberdayaan desa, merupakan peluang untuk meningkatkan perekonomian desa sekaligus membangun sistem ekonomi perdesaan melalui pengembangan aset desa secara efektif. Perlu adanya perhatian khusus dan penataan pasar-pasar yang merupakan aset desa dan aset Pemerintah Daerah yang bisa menjadi BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dapat menambah sumber

Pendapatan Asli Desa/Daerah. Pada Tabel 3.7 adalah daftar Pasar Desa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 3.5  
Jumlah Pasar Desa Di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Nama Pasar
1	Pesisir Selatan	Pasar Biha, Pasar Sumur Jaya, Pasar Senen
2	Bengkunat Belimbing	Pasar pintau, Pasar Way Heni
3	Ngambur	Pasar Way Batang, Pasar Lansak, Pasar Cahaya Kuningan, Pasar Sumber Agung
4	Pesisir Utara	Pasar Kerbang Langgar, Pasar Gedau, Pasar Rata Agung
5	Lemong	Pasar Lemong, Pasar Melesom
6	Karya Penggawa	Pasar Ulok Pandan, Pasar Menyancang, Pasar Penengahan, Pasar Kebuayan, Pasar Laay
7	Krui Selatan	Pasar Mandiri, Pasar Way Napal,
8	Bengkunat	Pasar Bandar Agung,
9	Pesisir Selatan	Pasar Way Batu, Pasar Pagi, Pasar Klewer

Sumber: *BPMPK Kabupaten Pesisir Barat, 2015*

### 3) Kawasan Perkantoran/Pemerintahan

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat masih menyusun Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah yang nantinya akan menjadi acuan pengembangan wilayah di Kabupaten Pesisir Barat termasuk untuk kawasan perkantoran/pemerintahan. Untuk sementara ini kawasan perkantoran/pemerintahan masih menumpang/menyewa di gedung milik pemerintah atau gedung-gedung milik masyarakat dan swasta. Lokasi sementara Kawasan

perkantoran/pemerintahan utama berada menyebar di Kecamatan Pesisir Tengah dan Krui Selatan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang disusun untuk Kabupaten Pesisir Barat di harapkan pengembangan wilayah Fasilitas perkantoran utama yang diarahkan untuk dikembangkan di kawasan perkantoran nantinya antara lain meliputi perkantoran pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, kantor dinas/instansi pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, kantor instansi vertikal di Kabupaten Pesisir Barat, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas kegiatan lain yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/olah raga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya.

#### **4) Kawasan Rekreasi**

Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan kabupaten dengan garis pantai sekitar 210 Km merupakan potensi untuk pengembangan pariwisata. Selain sebagai tempat rekreasi pantai di Kabupaten Pesisir Barat merupakan pantai yang dapat digunakan untuk olahraga terutama olahraga surfing. Ombak yang terdapat di pantai kabupaten

Pesisir Barat hampir semuanya bisa digunakan untuk olahraga surfing, bahkan wisata Pantai Tanjung Setia yang berada di Kecamatan Pesisir Selatan termasuk salah satu dari 6 pantai di dunia dengan ombak tertinggi dan merupakan sasaran wisatawan mancanegara dengan jumlah wisatawan  $\pm 1.350$  wisatawan/Tahun. Perlu juga penyediaan kawasan rekreasi berupa taman hijau yang bisa menjadi icon selain kawasan wisata yang sudah ada yang peruntukannya untuk keluarga, aman bagi anak-anak dan orang tua.

#### **5) Pertanian**

Di Kabupaten Pesisir Barat sektor pertanian (secara umum) masih merupakan salah satu pilar utama bagi perkembangan wilayah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat. Dukungan sektor pertanian terhadap PDRB dicapai melalui peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

##### **(a) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Komoditas utama tanaman pangan di Kabupaten Pesisir Barat adalah padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Adapun komoditas paling utama di Kabupaten Pesisir Barat adalah padi baik padi sawah maupun padi ladang. Produksi padi mendukung ketersediaan pangan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat (dalam bentuk beras). Sentra padi di Kabupaten

Pesisir Barat adalah kecamatan : Pesisir Selatan, Karya Penggawa, Ngambur, Bengkunt Belimbing. Hortikultura terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Untuk sayuran komoditas utama adalah : kubis, sawi, bawang daun, tomat, cabe besar dan labu siam. Produksi sayuran di Kabupaten Pesisir Barat digunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah sendiri dan dipasarkan keluar Kabupaten Pesisir Barat. Buah-buahan utama Lampung Barat adalah : durian, duku, alpukat dan pisang. Hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Pesisir Barat sendiri dan keluar Pesisir Barat.

#### **(b) Tanaman Perkebunan**

Peran dan kontribusi subsektor perkebunan selama ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung, khususnya pembangunan sektor pertanian dan secara umum pembangunan wilayah, baik berperan langsung terhadap pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelangsungan program ketahanan pangan, maupun berperan tidak langsung dalam membangun hubungan sinergis dengan subsektor yang lain.

Komoditi Damar Mata Kucing merupakan hasil perkebunan andalan Kabupaten Pesisir Barat disamping hasil kebun lainnya seperti cengkeh, lada, kopi, sawit, karet dan lain sebagainya. Untuk

meningkatkan produksi komoditi perkebunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melakukan berbagai upaya, antara lain (1) Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada petani dalam hal penanaman pohon pelindung, pengendalian gulma dan perawatan tanaman, (2) Menggerakkan petani untuk menanam tanaman sela diantara tanaman utama dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan petani dari hasil tanaman sela.

**(c) Perikanan**

Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pesisir Barat tersebar di 11 kecamatan terdiri potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap Kabupaten Pesisir Barat sepanjang  $\pm$  210 km dari garis pantai atau 19 persen dari panjang garis pantai Provinsi Lampung, yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Sejauh 0-4 mil ( $\pm$  168.941 ha) adalah merupakan wilayah tangkap yang dikelola Kabupaten Pesisir Barat dengan Jumlah nelayan mencapai 2.252 orang. Potensi penangkapan mencapai 142.197 ton/th (Tim IPB,1999) dengan total produksi mencapai 10.977,8 ton (tahun 2011) atau hanya 7,7%. Potensi ikan bernilai ekonomis tinggi diantaranya Tuna, Setuhuk (Blue marlin) lobster dan lain-lain.

Selain perikanan tangkap Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan air tawar dan budidaya, karena masih terdapat banyak rawa yang bisa diberdayakan menjadi kolam budidaya air tawar dan sungai-sungai yang dimanfaatkan airnya sebagai sumber pengairan kolam-kolam tersebut. Setiap tahun terjadi peningkatan konsumsi ikan yang disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan tingkat pengetahuan bahwa kandungan protein pada ikan yang sangat tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan dan menambah kecerdasan anak.

**(d) Kehutanan**

Permasalahan umum yang menyangkut kawasan hutan dan menyebabkan perambahan setiap tahun selalu bertambah, yang menyebabkan tekanan terhadap kawasan hutan meningkat dan pada akhirnya bermuara pada meningkatnya lahan kritis adalah tata batas lahan yang tidak jelas atau bergeser karena banyaknya patok penanda kawasan hutan yang hilang, besarnya tuntutan atas pemukiman, tuntutan masyarakat akan tanah dan sengketa pengelola izin wisata buru. Solusi atas permasalahan diatas melibatkan multipihak dan memerlukan proses rekonstruksi batas wilayah hutan yang memerlukan dana dan sumberdaya yang tidak sedikit.

### **(e) Pertambangan, Energi dan Penggalian**

Pertambangan dan Energi di wilayah Pesisir Barat dipengaruhi oleh faktor dan proses geologi yang terjadi di daerah tersebut. Daerah kecamatan Lemong, Pesisir utara, Karya Penggawa, Pesisir tengah, Pesisir selatan dan Bengkunt, memiliki potensi batuan asam granit, batu gamping batuan malihan/metamorf tuf Lampung dan aluvium serta potensi listrik mikro hidro. Berdasarkan analisa lokasi didapatkan bahwa di daerah Pesisir selatan terdapat batubara, emas di Pesisir selatan, Pesisir tengah dan Lemong. Tanah diatom ada di Bengkunt, Trass di kecamatan Pesisir utara.

### **(f) Industri Pengolahan**

Usaha Industri unggulan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Kawasan Usaha Agro Terpadu (KUAT) di Kecamatan Pesisir Selatan disamping Industri kecil mempunyai peran cukup penting dalam mengatasi masalah pengangguran, akan tetapi jumlah usaha IKM ini kurang mengembirakan disebabkan inovasi dan kreasi produk IKM amat minim, pemasaran yang terbatas, penguasaan teknologi yang masih sederhana. Perlu adanya kajian tentang pengembangan usaha.

## 2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat pada tiap kecamatan tidak stabil yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penduduk pindah, datang, lahir dan meninggal. Dengan berubahnya status daerah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), menjadikan suatu daerah semakin berkembang dengan berkembangnya suatu daerah diiringi juga bertambahnya jumlah penduduk baik itu bertambah secara alami maupun adanya migrasi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah 156.276 Jiwa yang terdiri dari 79.444 Jiwa penduduk Laki-laki dan 76.839 Jiwa penduduk Perempuan. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015.

Tabel 3.6  
Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat  
Berdasarkan Jenis Kelamin Per-Bulan Maret Tahun 2015

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Kk	Penduduk (Jiwa)			Luas Wilayah
				L	P	Jumlah	Luas (Km2)
1	Pesisir Selatan	15	6,291	12,062	11,432	23,494	409.17
2	Pesisir Tengah	8	4,569	9,553	8,872	18,425	120.64
3	Pesisir Utara	12	2,077	4,604	4,177	8,781	84.27
4	Karya Panggawa	12	3,426	7,863	7,511	15,374	211.11
5	Lemong	13	3,304	7,295	6,307	13,602	454.97
6	Bengkunat	9	2,414	5,709	5,616	11,318	215.03
7	Ngambur	9	4,890	9,733	9,451	19,184	327.17
8	Bengkunat Belimbing	14	6,181	11,143	12,860	24,003	943.7
9	Way Krui	10	2,353	5,085	4,461	9,546	40.92
10	Krui Selatan	10	2,470	5,390	5,194	10,584	36.25
11	Pulau Pisang	6	495	1,007	958	1,965	64
<b>Jumlah</b>		<b>118</b>	<b>38,470</b>	<b>79,444</b>	<b>76,839</b>	<b>156,276</b>	<b>2,907.23</b>

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pesisir Barat, 2015

Penduduk Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya menempati wilayah yang memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan wilayah lain dan menempati daerah yang nyaman. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat yang meningkat. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat perbandingan antara jumlah penduduk dan luas lahan di Kabupaten Pesisir Barat, semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan pada tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup.

## **B. Kriteria Daerah Tertinggal**

Berdasarkan Lampiran Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, yang direalisasikan di Jakarta pada tanggal 4 November 2015 oleh Presiden Republik Indonesia (Jokowi Dodo), menetapkan 122 Kabupaten daerah tertinggal di Indonesia yang di antaranya Provinsi Lampung mewakili 2 (dua) Kabupaten tertinggal yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat.<sup>91</sup> Kriteria daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Jakarta, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015.

## 1. Perekonomian Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, bisa ditunjukkan dari meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan perkapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB Perkapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau satu orang penduduk<sup>92</sup>.

Tabel 3.7  
PDRB Per Kapita Kabupaten Pesisir Barat Dan Provinsi Lampung  
(Rp) 2012-2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pesisir Barat	16,44	17,66	19,69	22,30
Provinsi Lampung	23,91	25,77	28,78	31,19

Sumber: BPS Lampung Barat, 2015

Nilai PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2012-2015 selalu mengalami peningkatan. Meskipun angka perkapita ini bersifat global tanpa melihat nilai tersebut benar-benar secara merata diterima oleh setiap individu di Kabupaten Pesisir Barat, Namun dengan melihat perkembangannya dapat diketahui adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat secara umum dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015 adalah sebesar 22,20 juta rupiah dengan

<sup>92</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat Dalam Usaha, 2012*. (Liwa, BPS Kabupaten Lampung Barat, 2016), h. 59.

pertumbuhan sebesar 12,74 persen dibandingkan tahun 2014, sedangkan ditahun 2014 PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat hanya sebesar 19,69 juta rupiah.

Peningkatan pendapatan perkapita di Kabupaten Pesisir Barat juga sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita Provinsi Lampung, meskipun nilai PDRB Perkapita untuk Kabupaten Pesisir Barat selama empat tahun terakhir masih berada dibawah angka PDRB Perkapita Provinsi Lampung. Pada tahun 2015, PDRB Perkapita Provinsi Lampung mencapai 31,19 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 8,38 persen dibandingkan tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2014 hanya sebesar 28,78 juta rupiah.<sup>93</sup>

## **2. Sumberdaya Manusia**

Sebagai daerah otonomi baru (DOB), hingga saat ini sumber daya aparatur pemerintahan, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Kontrak (honorar) dan Tenaga Kerja Harian Lepas (THLS) masih belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kuantitas, jumlah kebutuhan sumber daya aparatur belum seimbang dengan beban kerja dari masing-masing Perangkat Daerah atau dengan kata lain jumlah aparatur belum mencukupi dalam pelaksana tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jabatan yang belum terisi, sehingga masih terdapat rangkap jabatan dan rangkap beban kerja di masing-masing Perangkat Daerah.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 60.

Sementara itu, dari sisi kualitas sumber daya aparatur juga belum memadai, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya sumberdaya aparatur yang belum memiliki sertifikat keahlian khusus di bidang tugasnya. Atau dengan kata lain masih banyak sumber daya aparatur yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan teknis (bimtek). Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan juga mempengaruhi pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan publik. Kabupaten Pesisir Barat harus lebih memacu diri dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah dapat lebih maksimal dilaksanakan. Berikut adalah rekapitulasi PNS Pesisir Barat Tahun 2017 dan rencana kebutuhan PNS Kabupaten Pesisir Barat

Tabel 3.8  
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil  
Kabupaten Pesisir Barat, 2017

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Jumlah Kebutuhan
1	Eselon II.a	1	-
2	Eselon II.b	25	-
3	Eselon III.a	51	-
4	Eselon III.b	86	-
5	Eselon IV.a	119	-
6	Eselon IV.b	27	-
7	Fungsional Umum	501	2973
8	Fungsional Tertentu	34	184
9	Fungsional Guru	956	2259
10	Fungsional Kesehatan	161	259
<b>Jumlah</b>		<b>1961</b>	<b>5675</b>

Sumber: Data e-formasi, diolah, BKD Kabupaten Pesisir Barat, 2017..

### 3. Sarana dan Prasarana (*Infrastruktur*)

#### a. Kondisi Jalan

Kondisi infrastruktur (Jalan) di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data tercatat sepanjang tahun 2015 mengalami perubahan meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun masih terbilang rendah namun tetap mengalami perubahan. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 kondisi jalan berdasarkan kategori baik mengalami peningkatan yang cukup tinggi, semula 80,35 Km meningkat menjadi 174,35 Km di sepanjang tahun 2015. Demikian juga kategori jalan rusak mengalami sedikit peningkatan, hal demikian dipengaruhi oleh faktor geografis, selain itu rendahnya tingkat kemantapan jalan dan diperparah dengan tonase kendaraan yang jauh lebih berat dibanding dengan kelas jalan yang dilalui, hal ini menyebabkan jalan diantaranya mengalami kerusakan.<sup>94</sup> Berikut adalah data kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014-2015.

Tabel 3.9  
Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat 2014-2015

No	Kondisi Jalan (Kategori)	Tahun	
		2014	2015
1	Baik	80,35	174,35
2	Rusak Ringan	45	95
3	Rusak Sedang	56,95	56,95
4	Rusak Berat	206,5	285,95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2013

<sup>94</sup> IP. Tanjung, wawancara dengan penulis, Krui, Kabupaten Pesisir Barat 25 Agustus 2017.

#### 4. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.<sup>95</sup> Berikut adalah APBN Kabupaten Pesisir Barat TA 2015-2017 (Rupiah).

Tabel 3.10  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Pesisir Barat TA 2015-2017 (Rupiah)

No	Uraian	APBD/Tahun Ajaran (RP)		
		2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>570.949.750.118,00</b>	<b>766.186.221.931,00</b>	<b>805.152.479.304,00</b>
a	Pendapatan Asli Daerah	5.950.540.540,00	19.679.958.960,00	21.067.048.304,00
b	Dana Perimbangan	442.016.962.291,00	623.834.905.695,00	643.667.525.000,00
c	Pendapatan lain-lain	122.982.247.287,00	122.671.357.276,00	140.417.906.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>630.664.930.700,00</b>	<b>844.653.959.654,00</b>	<b>824.089.104.640,00</b>
a	Belanja Tidak Langsung	300.713.738.746,00	348.493.826.144,00	360.240.953.700,00
b	Belanja Langsung	329.951.191.954,00	496.160.133.510,00	472.298.346.300,00
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>59.715.180.582,24</b>	<b>79.065.102.023,00</b>	<b>23.436.625.336,00</b>
a	Penerimaan Pembiayaan	59.715.180.582,24	79.065.102.023,00	23.436.625.336,00
b	Pengeluaran Pembiayaan	0	78.565.102.023,00	4.500.000.000,00

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2016.

<sup>95</sup> Azwin Rizkiano, *Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah periode 2004-2008 di Salatiga*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h. 17.

Aspek kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik. Aspek kesejahteraan dapat dilihat dari Pertumbuhan PDRB dari daerah tersebut. Berikut adalah tabulasi perbandingan Nilai dan Peranan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten /kota se-Provinsi Lampung Tahun 2014-2015.

Tabel 3.11  
Perbandingan Nilai dan Peranan PDRB adhb Kabupaten/Kota se-  
Provinsi Lampung Tahun 2014-2015

No	Kabupaten Kota	PDRB adhb (Juta Rupiah)		Peranan PDRB adhb terhadap PDRB Provisni Lampung (%)	
		2014	2015		
1	Lampung Barat	4.657328,06	5.126.648,28	2,02	2,03
2	Tanggamus	10.201.361,36	11.423.769,35	4,42	4,51
3	Lampung Selatan	28.268.645,79	31.453.448,19	12,24	12,42
4	Lampung Timur	29.535.436,84	31.319.190,32	12,79	12,37
5	Lampung Tengah	44.365.407,74	48.791.889,60	19,21	19,27
6	Lampung Utara	15.402.138,35	16.910.749,94	6,67	6,68
7	Way Kanan	9.163.072,10	10.049.561,08	3,97	3,97
8	Tulang Bawang	14.939.452,52	17.022.373,42	6,47	6,72
9	Pesawaran	10.846.285,85	12.477.846,40	4,70	4,93
10	Pringsewu	7.360.050,18	8.088.126,76	3,19	3,19
11	Mesuji	6.558.477,61	7.291.204,62	2,84	2,88
12	Tulang Bawang Barat	7.407.147,04	8.112.709,48	3,21	3,20
13	Pesisir Barat	2.922.226,04	3.327.658,64	1,27	1,31
14	Bandar Lampung	35.339.801,98	39.174.980,21	15,30	15,47
15	Metro	4.277.231,05	4.650.679,76	1,85	1,84
<b>Lampung</b>		<b>230.968.634,92</b>	<b>253.162.538,32</b>	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2015

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Perspektif Ekonomi Islam.**

Berdasarkan ruang lingkup pembangunan daerah tertinggal tidak terlepas dari tingginya tingkat kemiskinan, banyak jumlah pengangguran serta kurang kesejahteraan sesungguhnya adalah isu prioritas yang mendesak untuk ditangani baik pada tingkat nasional, regional maupun tingkat kabupaten kota. Upaya pembangunan daerah sejak reformasi memperoleh perhatian yang benar serius, disebabkan banyak kasus yang membuktikan bahwa merebaknya tekanan kemiskinan akan menyebabkan timbulnya sejumlah akibat yang kontra-produktif bagi pembangunan seperti tingginya beban sosial ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, rendahnya kualitas dan produktifitas SDM, rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, serta kemungkinan terjadinya kemerosotan mutu generasi yang akan datang. Oleh karena itu, umumnya pembangunan perlu diberlakukan disuatu daerah sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka mengidentifikasi daerah tertinggal membentuk salah satu program yaitu dengan menggunakan

pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: (1) Perekonomian Masyarakat, (2) Sumber daya Manusia, (3) Prasarana (infrastruktur), (4) Kemampuan Keuangan Daerah, (5) Aksesibilitas, (6) Karakteristik Daerah. Berdasarkan kriteria tersebut tercatat bahwa Kabupaten Pesisir Barat terdapat 11 (sebelas) Kecamatan yang termasuk daerah tertinggal.

Upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal pemerintah kemudian menyusun Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PDT) yang dirumuskan bersama pusat dengan memerhatikan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung, serta konsultasi kepada seluruh *stakeholders* pembangunan daerah<sup>96</sup>. Penyusunan strategi percepatan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat pemerintah melakukan sebagai berikut:

### **1. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat.**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat adalah “Terwujudnya Kabupaten Pesisir Barat Menuju Kota Modern Berbasis Lingkungan”

---

<sup>96</sup> I.P Tanjung, wawancara dengan penulis, Dinas Bappeda Kabupaten Pesisir Barat, 25 Agustus 2017.

Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan, serta memperhatikan motto Kabupaten Pesisir Barat “*Helauni Kik Bakhong yang berarti Baiknya Kebersamaan*” maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018, adalah: Terwujudnya Kabupaten Pesisir Barat Menuju Kota Modern Berbasis Lingkungan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, selanjutnya dirumuskan Misi yaitu:

- a. Meningkatkan Pemanfaatan potensi Perikanan dan Kelautan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat
- b. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan budaya daerah
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi
- e. Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau
- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau
- g. Meningkatkan kesadaran pembangunan berwawasan lingkungan

Untuk melaksanakan Misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan uraian sebagai berikut:

**a. Meningkatkan Pemanfaatan potensi Perikanan dan Kelautan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.**

1) Tujuan

- (a) Meningkatkan pendapatan masyarakat, perternakan, kelautan dan perikanan
- (b) Meningkatnya akselerasi pembangunan perternakan, kelautan dan perikanan.
- (c) Terjaganya kualitas lingkungan sumberdaya perternakan, kelautan dan perikanan

2) Sasaran

- (a) Meningkatnya produksi :
  - (1) Perikanan tangkap sebesar 5%
  - (2) Perikanan budidaya sebesar 5% /tahun
  - (3) Olahan sebesar 5%/tahun
  - (4) Daging sebesar 5%/tahun
- (b) Meningkatnya tingkat konsumsi :
  - (1) Ikan sebesar 5%/tahun
  - (2) Daging sebesar 5%/tahun
- (c) Meningkatnya PAD sebesar 10% pertahun

Sebagaimana kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat, bukan saja tanahnya yang subur tetapi kelautan yang dimiliki

kawasan tersebut menjadi ciri khas tersendiri, sepanjang jalan daerah tersebut adalah pantai sehingga jika daerah memanfaatkan dengan menata kembali maka hal ini akan berkontribusi untuk pendapatan daerah. Terlepas dari itu laut yang mengarungi kawasan tersebut pun memiliki potensi besar untuk kekayaan daerah, pemanfaatan perikanan juga akan mendapatkan hasil yang baik karena melihat kawasan laut yang langsung mengarah pada samudera hindia, namun pemanfaatannya belum maksimal akibat peralatan yang belum cukup serta kurangnya pelatihan pada sumberdaya manusia. Dalam perspektif ekonomi Islam strategi ini tidaklah lepas dengan ketentuan Allah SWT yang berfirman dalam Al-Quran menerangkan agar manusia bisa memanfaatkan serta mengelola sumberdaya kelautan supaya mereka sejahtera, Maka hal ini tentunya terterang dalam Al-Qur'an surah An-Nahl [16] ayat 14 bahwasannya Allah berfirman :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 PADJARAN  
 LAMPUNG

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*”Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari*

(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”. (QS. An-Nahl : 14)<sup>97</sup>.

Sebagaimana hadist Rosulullah Saw yang juga menerangkan tentang bolehnya memanfaatkan hasil laut untuk dikonsumsi, hal ini tertuang dalam hadis tentang halalnya memakan ikan yang telah mati akibat seretan ombak laut:

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: عَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأَمَرَ أَبُو عَبِيدَةَ فَجَعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيْتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ، يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عَبِيدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَ الرَّاكِبَ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ أَبُو عَبِيدَةَ: كُلُوا فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُلُوا، رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ، أَطْعَمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ» فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَ

“Dari Ibnu Juraij dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku ‘Amr, dia berkata, dia pernah mendengar Jabir berkata; ‘Kami pernah berperang bersama pasukan Khabath (pemakan daun-daunan) yang pada waktu itu Abu Ubaidah di angkat sebagai pemimpin pasukan. Lalu kami merasa lapar sekali. Tiba-tiba laut melemparkan ikan paus yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ikan itu disebut al-Anbar. Kami makan dari ikan itu selama setengah bulan. Kemudian Abu Ubaidah mengambil salah satu bagian dari tulangnya dan dia pancangkan. Hingga seorang pengendara bisa lewat dibawah tulang itu. Telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwasanya dia mendengar Jabir berkata; Abu ‘Ubaidah berkata; ‘Makanlah oleh kalian semua! Tatkala kami sampai di Madinah, kami hal itu kami beritahukan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: ‘Makanlah, itu adalah rizki yang telah Allah

<sup>97</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Jasa Media Utama, 1997), h. 214.

*berikan. Jika masih tersisa, berilah kami! Maka sebagiannya di bawakan kepada beliau dan beliau pun memakannya*<sup>98</sup>”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan kata “*alqā al-bahra hūtan mayyitan*” dan kata “*rizqan akhrajahullāhu*”, menjelaskan bahwa pada laut terkandung keragaman hayati di antaranya ada yang bersifat konsumtif dan ada yang tidak, segala bentuk hewan laut yang keluar darinya akibat hempasan ombak yang terseret ke pantai dan merupakan bagian spesies hewan yang biasa dikonsumsi oleh manusia yang hidup disekitar pesisir pantai, maka hewan-hewan tersebut harus diangkat dari pesisir pantai dan dikonsumsi, sebab dalam redaksi hadisnya menyebutkan ikan yang terhempas oleh ombak laut dan telah mati dan Rasulullah saw memerintahkan untuk dikonsumsi, bahkan beliau meminta sebahagian darinya untuk beliau konsumsi juga sebagaimana dalam sabdanya: *كُلُوا، رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ، أَطْعَمُونَا إِنْ كُنَّا مَعَكُمْ* (Makanlah, itu adalah rizki yang telah Allah berikan. Jika masih tersisa, berilah kami!). Kata “*mayyitan*” berarti bangkai, itu menunjukkan bahwa seluruh hewan laut yang telah menjadi bangkai halal dikonsumsi dengan merujuk kepada perintah Nabi saw dalam bentuk sabda (perkataan) untuk memakannya, serta pada praktik Nabi saw yang

<sup>98</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhary (w. 256 H), *al-Jami' al-Musnad al-Shahih*, No. Hadis: 4361; dan 248, h. 375; *Sunan al-Nasa'y*, No. Hadis: 4277. Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad, Musnad Jabir bin 'Abdillah*, No. hadis: 13795; 13817; dan 14517.; *Sunan al-Darimy*, No. Hadis 1927. Dengan lafazh *حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْبَحْرَ وَقَدْ قَدَفَتْ دَابَّةٌ فَأَكَلْنَا مِنْهَا* (kamipun sampai ke pantai, tiba-tiba laut melemparkan ikan besar dan kamipun memakan dagingnya).

memakan bangkai ikan paus yang merupakan sisa dari apa yang telah dimakan oleh para sahabatnya.

**b. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan budaya daerah.**

1) Tujuan

- (a) Meningkatkan Upaya pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan dan kepariwisataan ekonomi kreatif.
- (b) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (c) Meningkatkan pengembangan dan daya tarik wisata usaha jasa dan sarana pariwisata yang memenuhi standarisasi kelayakan usaha pariwisata kelayakan usaha pariwisata sesuai dengan minat wisatawan
- (d) Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan secara ekonomis menguntungkan masyarakat

2) Sasaran

- (a) Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan yan berkesinambungan secara ekonomis menguntungkan masyarakat.
- (b) Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran
- (c) Meningkatnya kapasitas pelaksanaan tugas aparatur
- (d) Meningkatnya prosentase jumlah kunjungan wisatawan

- (e) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pariwisata adalah salah satu jantung kemajuan ekonomi suatu daerah selain kemajuan bisnis dan perbankan dalam perspektif ekonomi islam. Pariwisata tentu sangatlah penting dalam ekonomi sebuah daerah karena keberadaannya menambah lahan bisnis bagi masyarakat disekitar tempat pariwisata. Bisnis inipun menjadi semakin bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan tempat pariwisata pada umumnya, seperti cenderamata, penginapan, tempat makan dan transportasi. Seperti yang kita tahu bahwa Islam mengatur kehidupan seorang muslim disetiap aktivitasnya, aktivitas harian, bulanan maupun tahunan, jadi sektor pariwisata juga telah diatur batasan-batasannya oleh Islam. Hal itu disebabkan pariwisata sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi seorang muslim, seperti berpengaruhnya terhadap ekonomi global ataupun ekonomi islam.

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata “*al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar*”<sup>99</sup> atau dalam bahasa Inggris dengan istilah “*tourism*” secara defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan

---

<sup>99</sup> Rohi Baalbaki, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, (dar al Ilm Almalayin: Beirut, 1995), h. 569.

menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.<sup>100</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am [6] ayat 11:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu (QS. Al-An'am : 11)<sup>101</sup>."

Pariwisata memiliki nuansa keagamaan yang tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi. Dalam pandangan Islam, Pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual, tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri (*syahriah*).

Pada dasarnya Islam tidak melarang seorang melakukan wisata diberbagai macam tempat, selagi masih mampu mempertimbangkan antara *kemaslahatan* atau manfaat dan *mafsadat* atau keburukan. Di dalam kaitan ini maka bila dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan agama adalah positif. Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan agama niscaya akan negatif terhadap kegiatan wisata itu. Di dalam hal ini belaku kaidah menghindari keburukan (*mafsadat*) lebih utama daripada mengambil kebaikan (*maslahat*). Oleh

<sup>100</sup> John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT. Gramedia,, 2010), h 156

<sup>101</sup> *Op.Cit*, h. 187.

karena itu, pandangan agama akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Agama akan berpandangan negatif terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari kemauan syariat, maka hal itu ditolak. Sehubungan dengan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan daerah tertinggal, yaitu dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan keparawisataan ekonomi kreatif sesungguhnya tidak menyalahi aturan dalam Ekonomi Islam, justru hal demikian diperbolehkan ketika pengembangan pariwisata tersebut dapat menambah pendapatan bagi masyarakat sekitar.

**c. Meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan.**

1) Tujuan

- (a) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan pendukungnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (b) Mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat yang mandiri melalui sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- (c) Terpeliharanya potensi sumber pendapatan masyarakat disektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan secara ber-kesinambungan

- (d) Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan guna mendukung penyampaian informasi dan teknologi terbaru dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

## 2) Sasaran

- (a) Tersedianya SDM Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang berkualitas, terdidik dan terlatih.
- (b) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
- (c) Tersusunnya program penyuluhan secara ber-kesinambungan dalam penerapan teknologi Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- (d) Meningkatnya pengetahuan masyarakat yang bergerak disektor Pertanian, Per-kebunan dan Kehutanan baik dalam proses produksi, penanganan pasca panen, maupun pemasaran guna meningkatkan pendapatan

Allah SWT sebagai Tuhan mempunyai tanda-tanda ketuhanan-Nya berupa hasil-hasil ciptaan-Nya, berupa langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya, juga apa yang ada diantara keduanya. Termasuk juga kejadian-kejadian yang berlangsung dalam mahluk-Nya tersebut. Kemudian Allah SWT menyuruh untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan-Nya termasuk pada tanaman dan tumbuhan. Sedangkan

pertanian, perkebunan dan kehutanan tidaklah lepas dari tanaman dan tumbuhan yang Allah menyuruh untuk memperhatikan dan memikirkan atas kekuasaannya itu. Sehubungan dengan itu, Allah berfirman dalam QS. An-Nahl [16] ayat 11 dimana dalam ayat ini Allah menyuruh memperhatikan atas tanda-tanda kekuasaan-Nya berupa tanaman maupun tumbuhan:

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (QS. Am-Nahl : 11)<sup>102</sup>.*

Dari ayat tersebut telah menerangkan bahwa dibalik ciptaan-Nya terdapat pelajaran dan manfaat dimana manusia di tuntut untuk mampu mengelola dan memanfaatkan dari apa yang telah Allah SWT tumbuhkan sebagian dari kekuasaan-Nya. Sebagaimana ayat tersebut, maka dalam perspektif Ekonomi Islam strategi dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal yang diterapkan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan memaksimalkan pemanfaatan kehutanan, pertanian dan

<sup>102</sup> Departement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 403.

perkebunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sesungguhnya di menyalahi atauran dalam Islam.

**d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum, Jaringan Transportasi dan Komunikasi.**

1) Tujuan

- (a) Meningkatkan pelayanan dan pengamanan angkutan di jalan raya
- (b) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan.
- (c) Menyelenggarakan kerjasama informasi dan komunikasi dengan Masa Media

2) Sasaran

- (a) Terselenggaranya pelayanan dan pengamanan angkutan di jalan raya
- (b) Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan
- (c) Terselenggaranya kerjasama informasi dan komunikasi dengan Masa Media.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi hal yang menjadi dorongan daerah tersebut dapat berkembang dan maju atau tidaknya adalah dengan adanya kualitas pelayanan umum yang baik, jaringan transportasi dan didukung dengan komunikasi, maka hal itu merupakan sangat penting

bagi suatu daerah dalam menunjang pembangunan, karena dengan adanya hal demikian maka suatu daerah dapat mudah terhubung dengan daerah luar sehingga akan mendukung kelancaran pembangunan.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehubungan dengan strategi yang diterapkan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dimana hal demikian tertuang dalam instrumen kebijakan terkait meningkatkan pelayanan umum di daerah Kabupaten Pesisir Barat, Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 267 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
 مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah : 267)<sup>103</sup>*

Menurut Thorik G. dan Utus H. (2006), pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas disebabkan pelayanan (service) tidak hanya sebatas mengantarkan atau melayani. Untuk itu pelayanan umum jika dikaitkan dengan ilmu baru *hikmatologi*<sup>104</sup> sangatlah tepat karena bisa menjadikan tolak ukur dalam pelayanan, bisa mengontrol dan mengawasi demi berjalanya suatu pelayanan yang memuaskan dalam segi islam.<sup>105</sup>

Sedangkan upaya lain oleh pemerintah kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan dibidang transportasi, pada dasarnya kabupaten tersebut memiliki Bandar Udara (bandara) dengan nama Bandara Serai yang saat ini diubah menjadi bandara Taufik Kiemas. Bandara tersebut mulanya dibuat bertujuan untuk Kemaslahatan masyarakat setempat yaitu

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 67.

<sup>104</sup> *Hikmatologi* adalah ilmu tentang penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Dalam hal ini pengetahuan didasarkan pada Syari’at Islam

<sup>105</sup> Thorik G. dan Utus H, *Marketing Muhammad* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006 ), h.77.

digunakan untuk evakuasi dan antisipasi bencana alam<sup>106</sup>, namun dilihat dari segi ekonomi bandara tersebut memiliki potensi yang cukup baik dan dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah, juga dapat menjadi daya tarik guna memancing investor.

Sebagaimana perspektif Ekonomi Islam dalam upaya pemerintah tentang Prasarana Transportasi merupakan kewajiban suatu daerah untuk mengelolanya demi kemaslahatan umat, bukan didasarkan pada perhitungan untung dan rugi melainkan menjadi sebuah bentuk pelayanan kepada umat. Sebagaimana didasarkan pada prinsip Ekonomi Islam yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb almashalih wa dar'u al-mafasid*).<sup>107</sup>

## **2. Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat.**

Pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dapat terlaksana dengan baik, terarah dan tepat sasaran, maka dari strategi pembangunan daerah tertinggal perlu ditentukan prioritas pembangunan yang diharapkan dapat menyentuh segala permasalahan persoalan yang menjadi penyebab ketertinggalan di daerah Pesisir Barat. Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Pesisir Barat adalah:

---

<sup>106</sup> Armen Qodar, SP., MM, wawancara dengan penulis, Dinas Bappeda di Kabupaten Pesisir Barat, 26 Agustus 2017.

<sup>107</sup> H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.), h. 130.

### a. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan prioritas utama dalam pembangunan percepatan daerah tertinggal karena masalah ekonomi merupakan salah satu akar penyebab kemiskinan dan sangat terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas ini diharapkan peningkatan ekonomi masyarakat daerah tertinggal dapat dipacu dengan pendayagunaan potensi sumber daya lokal (sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, serta sumber daya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada. Program Kebijakan Pengembangan Perekonomian yaitu sebagai berikut :1) Program Fasilitasi Peluang Permodalan bagi KSP/USP, 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, 3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, 4) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dan 5) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan. Pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi suatu daerah tertentu dimana hal ini juga melibatkan aktifitas masyarakat pada penataannya, sesungguhnya penerapan yang dilakukan pemerintah daerah tersebut merupakan upaya yang terterang dalam QS. Hud [11] ayat 61 :

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (QS. Hud : 61)”<sup>108</sup>

Kata kerja *ista'mara* merupakan ungkapan yang menunjukkan pada kedudukan manusia. Kata kerja ini dibentuk dari kata kerja yang lain, yaitu *عمر*. Kata ini terdiri atas huruf-huruf 'ain, mim, dan ra. Makna pokok huruf-huruf ini, “kekekalan dan zaman yang panjang dan sesuatu yang meninggi” (seperti suara atau lainnya). Analisis morfologi kata ini adalah 'amara-ya'muru yang bermakna leksikal “panjang usia, banyak harta, menghuni, memanjangkan usia, membangun dan mengurus sesuatu dengan baik” Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa *عمر* adalah memakmurkan sesuatu sebagai upaya membangun untuk maju. Lafal *عمر* dengan segala bentuknya ditemukan 28 kali dalam Alquran. Alquran dalam beberapa ayatnya menggunakan *ya'muru* sebanyak dua kali, masing-masing terdapat pada Q.s. al-Tawbah [9]: 17-18. Dalam ayat ini, kata *ya'muru* digandengkan dengan kata *masjid*. Hal ini berarti memakmurkan masjid dengan jalan membangun, memelihara, membersihkan dan *i'tikâf*. Sedangkan Q.s. al-Rûm [30]: 9 menggunakan kata lampau 'amaru digandengkan dengan *ardh*. Ini berarti membangun bangunan serta mengelolanya untuk memperoleh manfaat.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> *Op.Cit*, h. 402.

<sup>109</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* Cet. XII (Bandung: Mizan, 1994), h.164.

## **b. Pemberdayaan Masyarakat**

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, 2) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik dan ekonomi produktif serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Pemberdayaan pada pengembangan kemampuan atau kapasitas dan kapabilitas masyarakat diimplementasikan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan, yaitu: 1) Program Pendidikan Masyarakat, 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, 4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, 5) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, 6) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, 7) Program Peningkatan Kesadaran Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber daya Laut, 8) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, 9) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, 10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, 11) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dan 12) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Jika ditinjau dalam Islam, Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah (2008), dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.<sup>110</sup>

Al Buraey (1986). menyimpulkan perspektif pembangunan Islami, baik matra sosial-ekonomi, politik, administrasi, atau budaya merupakan suatu sistem menyeluruh dan terpadu yang mengalamatkan dirinya kepada semua masalah-masalah kepribadian (eksistensi) manusia, baik jasmani ataupun rohani. Islam sangat menekankan agar menyeimbangkan antara keduanya. Tentunya aplikasi di kehidupan bermasyarakat adalah tumbuh kembangnya semangat untuk menyejahterakan diri dan orang lain.

---

<sup>110</sup> Istiqomah, Supriyantini. "Pemberdayaan Dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam. Komunitas". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni (2008), h. 65.

Bilamana konsepsi ini telah menjadi prinsip hidup manusia saat ini maka akan terbentuk suksesnya pembangunan bangsa.<sup>111</sup>

Memberdayakan rakyat yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Menurut Prijono, (1996) Pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan otonomi mereka dalam mengelola potensi sumber daya pesisir laut, laut, dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan sebagai jalan untuk menjamin kelangsungan hidup saat ini dan masa generasi selanjutnya. Dengan demikian, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pesisir dapat dicapai, dinamika sosial ekonomi lokal berkembang, dan potensi sumber daya alam terjamin kelestariannya.<sup>112</sup>

## **B. Analisis Faktor Eksternal dan Internal Daerah Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat.**

Untuk mengetahui potensi yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat, maka peneliti melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang mengedepankan 4 aspek yaitu: *Strength, Weakness, Oppurtunity, dan Threats*

---

<sup>111</sup> Al-Buraey, Muhammad A, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*/ Muhammad A. Al-Buraey; penerjemah, Achmad Nashir Budiman. Edisi, 1, Cetakan 1, (Jakarta: Rajawali, (1986). h.6.

<sup>112</sup> Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996), h. 97.

dalam menjalankan management strateginya. Apabila dilihat dari aspek pertama yaitu:

### 1. (Kekuatan) *Strength*

Pengertian dari *strength* dalam analisis SWOT adalah kekuatan atau kelebihan yang ada atau dimiliki pada suatu wilayah yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan strategi, yang menjadi *strength* (kekuatan) yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I.P Tanjung selaku Pegawai Bappeda bagian Perencanaan dan Pembangunan dan Bapak Armen Qodar, SP., MM selaku Sekretaris di Bappeda Kabupaten Pesisir Barat, bahwa terdapat banyak kelebihan yang dimiliki daerah tersebut yang diantaranya adalah:

- a. Luasnya areal penangkapan ikan yang memungkinkan untuk masuknya investor
- b. TNBBS, Pulau Pisang serta Pantai di Kabupaten Pesisir Barat yang berpotensi untuk para-wisata.
- c. Potensi lahan pertanian yang masih luas.
- d. Kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan ada
- e. Ada potensi pengembangan tanaman perkebunan (Getah Damar, kopi, cengkeh, lada, dan nilam).
- f. Adanya Repong Damar untuk Agrowisata.
- g. Pengembangan melinjo (Pesisir Selatan), sawo (Pesisir Tengah), duku (Pesisir Utara), durian cukup baik.

- h. Adanya program pengembangan daerah irigasi baru.
- i. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung hal tersebut.
- j. Adanya dukungan yang kuat dari pimpinan daerah dan masyarakat terhadap hal tersebut.
- k. Kondisi Geografis yang mendukung akan hal tersebut.
- l. Kondisi Demografis yang mendukung dan layak untuk hal tersebut..
- m. Dukungan media sosial, sehingga meningkatnya keinginan masyarakat luar/dalam untuk datang kedaerah tersebut berkunjung.
- n. Dinamiika masyarakat yang mengarah pada perbaikan kualitas pelayanan aparatur kepada publik.

## 2. Kelemahan (*Weakness*)

Pengertian dari *weakness* dalam analisis SWOT adalah kelemahan yang ada dalam suatu daerah tersebut yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan strategi, yang menjadi *weakness* (kelemahan) pada daerah Kabupaten Pesisir Barat melalui wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Pesisir Barat bapak Armen Qodar, yaitu keadaan tempat masih belum tertata dan tidak memiliki ciri khas tersendiri sehingga masih banyak yang belum mengetahui daerah tersebut dan kaya akan potensi sumberdaya alamnya. Selain itu kelemahan Kabupaten Pesisir Barat lainnya ialah:

- a. Kurangnya biaya, sarana, dan prasarana operasional.
- b. Kualitas dan kuantitas petani yang kurang memadai.
- c. Belum ada peraturan daerah tentang sempadan pantai.
- d. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum *bottom-up*.
- e. Sistem pembinaan karier PNS belum baik.
- f. Frekuensi penyuluhan dan pelatihan Petani masih rendah.
- g. Belum tersosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Perda, SK Bupati.
- h. Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan penggalian Gol. C
- i. Proyek perkebunan tidak dapat memenuhi kebutuhan petani.
- j. Terbatasnya waktu kegiatan padat karya.
- k. Koordinasi dengan Taman Nasional masih kurang.
- l. Pengaturan sempadan pantai (Kepres 32/90) belum di-PERDA-kan.
- m. Belum terdapat lembaga pemberdayaan Nelayan secara khusus serta perlengkapan belum memadai.
- n. Terbatasnya jumlah Sumberdaya Manusia Aparatur secara kuantitas dan kualitas.
- o. Kondisi Sarana dan Prasarana yang belum memadai.
- p. Keuangan daerah yang belum stabil.

### 3. Peluang (*Opportunity*)

Pengertian dari *Opportunity* dalam analisis SWOT adalah peluang yang ada untuk suatu daerah yang bisa menjadi kesempatan bagi tersebut untuk lebih berkembang. Melalui wawancara yang telah dilakukan, peluang di

daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan diantaranya:

- a. UU No. 23 th 1997 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup
- b. UU No. 5 th 1990 Tentang pelestarian Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya
- c. UU No. 5 th 1983 Tentang Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam
- d. Kepres No. 32 th 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- e. UU No. 9 tahun 1985 Tentang Perikanan
- f. UU No. 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
- g. PP no. 20 th 1990 Tentang Pendidikan Menengah
- h. SK Bupati no. 9 th 1998 tentang Sistem Operasi Pengelolaan Lingkungan
- i. Peranan tokoh adat dan tokoh masyarakat masih tinggi
- j. Permintaan pasar ekspor terhadap komoditi perikanan : lobster dan ikan tuna cukup tinggi
- k. Kondisi geografis sebagai daerah penghubung dan penunjang
- l. Wilayah strategis berada pada kawasan Pantai yang panjang
- m. Daya tampung lahan yang luas
- n. Keterbukaan pemerintah daerah pada Investasi Swasta
- o. Keinginan dan semangat dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun Pesisir Barat.

#### 4. Ancaman (*Threats*)

Pengertian dari *threats* dalam analisis SWOT adalah ancaman yang yang berasal dari faktor eksternal yang berpotensi untuk menjadi penghambat bagi keberlangsungan berkembangnya pembangunan di daerah tersebut. Melalui wawancara yang telah dilakukan dan hasil pengamatan, maka ancaman untuk Kabupaten Pesisir Barat adalah diantaranya:

- a. Kemampuan SDM masyarakat masih rendah.
- b. Masih terdapat Pemakaian racun oleh masyarakat dalam penangkapan ikan.
- c. Masih terdapat orang dan masyarakat melakukan Perambahan hutan.
- d. Pengeboman oleh nelayan luar.
- e. Pengambilan material bangunan dari laut sehingga mempercepat abrasi pantai.
- f. Adanya instansi terkait yang melakukan kegiatan melebihi kewenangannya.
- g. Pemasaran bahan baku bom/bius ikan yang sangat bebas.
- h. Penambangan bunga/batu karang.
- i. Penegakan hukum yang tidak tegas.
- j. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat tentang pemanfaatan sumberdaya alam.
- k. Kemampuan permodalan dan keterampilan petani rendah.

- l. Adanya masyarakat yang tidak mengakui kawasan hutan HPT dan dianggap Tanah Marga.
- m. Pemilikan tanah melebihi batas maksimal, dan pemiliknya banyak dari luar.
- n. Pemilikan tanah secara absente.
- o. Kurangnya potensi/volume air untuk Irigasi.
- p. Dinamika perubahan peraturan dan kebijakan nasional yang berdampak pada implementasi pelaksanaan tugas, kewenangan dan kebijakan pembangunan daerah.
- q. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan yang responsif, partisipatif, transparan dan akuntabel.
- r. Belum optimalnya integrasi SPM dan tata ruang dalam dokumen perancangan.
- s. Terbatasnya kemampuan pembiayaan daerah dalam menunjang program pembangunan<sup>113</sup>.

---

<sup>113</sup> IP. Tanjung, wawancara dengan penulis, rekaman, Kabupaten Pesisir Barat, 25 Agustus 2017

### C. Penetapan Strategi di Kabupaten Pesisir Barat Dalam Upaya Percepatan Pembangunan

Dari penjabaran di atas maka dapat dibuat sebuah matrik SWOT, yang digunakan sebagai alat pencocokan yang penting yang membantu dalam mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu strategi SO (kekuatan peluang), strategi WO (kelemahan peluang), strategi ST (kekuatan ancaman), dan strategi WT (kelemahan ancaman). Adapun matrik SWOT disajikan dalam bentuk berikut:

Tabel 4.1  
Tabel Matrik SWOT (TOWS Matrik)

Faktor Internal	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TNBBS, Pulau Pisang serta Pantai di Kabupaten Pesisir Barat yang berpotensi untuk parawisata.</li> <li>2. Potensi lahan pertanian yang masih luas.</li> <li>3. Terdapat potensi pengembangan tanaman perkebunan (getah dammar, kopi, cengkeh, lada dan nilam).</li> <li>4. Kondisi Geografis wilayah Kabupaten Pesisir Barat mendukung akan halnya percepatan pembangunan.</li> <li>5. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada penataan pada wisata pantai serta kondisi Sarana dan Prasarana yang belum memadai.</li> <li>2. Kualitas dan kuantitas petani belum memadai.</li> <li>3. Frekuensi penyuluhan dan pelatihan Petani masih rendah.</li> <li>4. Mekanisme perencanaan dan pelaksana kegiatan belum <i>bottom-up</i>.</li> <li>5. Keuangan daerah yang belum stabil.</li> <li>6. Belum terdapat lembaga pemberdayaan nelayan secara khusus serta perlengkapan belum memadai.</li> <li>7. Tidak ada ciri khas</li> </ol>

	<p>pembangunan tersebut.</p> <p>6. Terdapat potensi pengembangan keluatan dan perikanan yang cukup tinggi.</p>	tersendiri di daerah tersebut dalam skala ekonomi
<b>Faktor Eksternal</b>	Daerah Kabupaten Pesisir, Provinsi Lampung	
<p><b>OPPORTUNITIES (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah daerah memiliki keterbukaan pada investasi swasta.</li> <li>2. Dukungan Media Sosial dalam mengeksplorasi keindahan hayati di Kabupaten Pesisir Barat.</li> <li>3. Daya tampung lahan yang luas.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Ekplorasi dan Eksploitasi SDA.</li> <li>5. Kondisi geografis sebagai daerah penghubung dan penunjang.</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.</li> <li>7. Keinginan dan semangat dari masyarakat dan pemerintah. daerah untuk bersama-sama membangun Pesisir Barat.</li> <li>8. Permintaan pasar ekspor terhadap</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (SO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi sangat berpengaruh dan memungkinkan untuk parawisata agar lebih tertata, seperti; penyediaan penginapan murah, makanan khas dan tidak meninggalkan budaya yang ada, lalu dimanfaatkan potensi SDA-nya ditambah lagi memanfaatkan maraknya Media Sosial sebagai peluang sehingga pengunjung lebih banyak mengetahui, karena makin banyak pengunjung, akan semakin banyak pendapatan.(S1,O1,O2)</li> <li>2. Dengan adanya ketetapan UU tentang Ekplorasi dan Eksploitasi SDA oleh Pemerintah dan didukung dengan lahan yang luas, maka daerah tersebut memiliki kesempatan baik untuk pengembangan</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (WO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbukaan Investasi memberikan peluang untuk parawisata agar lebih tertata dan lebih baik. maka dari itu daerah harus lebih fokus untuk memberikan peluang masuk pada investor, bisa digunakan dengan cara pemasaran atau memanfaatkan peran media yang semakin berkembang. (W1,O1)</li> <li>2. Dengan adanya Undang-Undang tersebut daerah memiliki wewenang untuk mengeksplor kembali potensi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan masyarakat. Maka hal yang perlu dilakukan adalah mengusahakan pengembangan dan pelatihan SDM, Meningkatkan pengetahuan</li> </ol>

<p>komoditi perikanan: lobster, dan ikan cukup tinggi.</p>	<p>tanaman perkebunan: Damar, kopi, cengkeh, lada, nilam, memperluas kembali dan menjadikan komoditas tersebut sebagai keunggulan komperatif bagi daerah Pesisir Barat terhadap daerah lain (S3,O3,O4)</p> <p>3. Sebagai daerah penghubung antara Provinsi Lampung dan Bengkulu, daerah tersebut memiliki kesempatan menunjukan ciri khas sebagai daerah pesisir yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan guna penarik pelintas jalan.serta memberikan kecukupan perlengkapan bagi nelayan dan pelatihan. Akan lebih baik menggunakan sumber pengetahuan dengan teknologi sehingga menambah jumlah komoditi tersebut untuk diekspos keluar daerah (S6,O5,O7).</p>	<p>masyarakat dibidang Teknologi atau dengan upayakan dalam pendirian Sekolah khusus Bidang: pertanian dan perkebunan, pelayaran, Ekonomi dan Teknologi. (W4,O4)</p> <p>3. Kondisi geografis sebagai penghubung dan penunjang menguntungkan Kabupaten Pesisir Barat dalam hal menambah pendapatan daerah guna pembangunan. Menerapkan destinasi wisata, meningkatkan bahan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi daerah satu sama lain, dan meningkatkan efisiensi biaya (W5,O5)</p> <p>4. Mengenalkan potensi Alam yang terdapat di daerah Pesisir Barat seperti kekayaan laut, potensi perkebunan kopi serta potensi pantai dan <i>sunset</i> kemudian dijadikan sebagai produk unggul daerah tersebut dan tidak meninggalkan budaya yang kuat, menjaga kelestarian</p>
--	--	--

		lingkungan dengan memanfaatkan peluang Sosial Media.
<b>THREATS (T)</b>	<b>STRATEGI (ST)</b>	<b>STRATEGI (WT)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat tentang pemanfaatan SDA.</li> <li>2. Kemampuan permodalan dan keterampilan petani masih rendah.</li> <li>3. Adanya masyarakat yang tidak mengakui kawasan Hutan HPT dan dianggap sebagai tanah marga.</li> <li>4. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam perancangan pembangunan.</li> <li>5. Penegakan Hukum yang tidak tegas serta Dinamika perubahan peraturan dan kebijakan nasional yang berdampak pada implementasi pelaksanaan tugas.</li> <li>6. Masih banyak masyarakat menggunakan racun dan pengeboman oleh nelayan tradisional dalam penangkapan ikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas masyarakat dalam pemanfaatan SDA yaitu dengan memberikan pelatihan dan pemahaman terkait perkebunan, pertanian dan mendayagunakan masyarakat untuk pengolahan lahan. Kemudian mendirikan lapangan pekerjaan dalam pengolahannya. Juga salah satunya pengolahan pada tanaman perkebunan; kopi, cengkeh dan sebagainya. (S1,T3)</li> <li>2. Untuk mengatasi tingginya tuntutan masyarakat yaitu perlu dengan adanya peningkatan mutu tenaga kerja yang fungsional. Menambah jumlah pegawai dan meningkatkan kualitas pegawai yang dibutuhkan masyarakat dan pembangunan. (S5,T4).</li> <li>3. Pemerintah harus membuat sanksi tegas terhadap oknum yang merusak ekosistem seperti penangkapan ikan dengan bom dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pemanfaatan SDA untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dan juga mendayagunakan masyarakat untuk menjaga kebersihan, tetap menjaga kelestarian lingkungan wisata pantai, tidak melakukan pencemaran lingkungan seperti pembuangan limbah. Tidak melakukan penambangan pasir ilegal sehingga menimbulkan abrasi pantai dan sebagainya. (W1,T1)</li> <li>2. Dalam menghindari ancaman nelayan tradisional yang melakukan <i>illegal fishing</i> maka strateginya adalah tingkatkan pengawasan terhadap nelayan, berikan pemahaman secara rutin tentang dampak</li> </ol>

	<p>racun. Perketat pengawasan terhadap masyarakat nelayan luar, tingkatkan pemahaman dan pengetahuan nelayan tentang <i>illegal fishing</i>, serta didirikan Badan Khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan <i>illegal fishing</i>.(S5,T6)</p>	<p><i>illegal fishing</i>, dan tentunya berikan pemahaman tentang cara menggunakan perlengkapan dan peralatan yang lebih baik dan menguntungkan. Jika terdapat kelemahan kegiatan belum <i>bottom up</i> maka strateginya adalah lakukan penelitian/survey, lakukan pengamatan secara keseluruhan dan kemudian kaji kembali potensi yang terdapat pada tiap daerah, sehingga dapat kembali dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. (W4,T6)</p>
--	---	---

Sebagaimana dapat dilihat dari matrik SWOT, Kabupaten Pesisir Barat memiliki strategi yang sesuai dengan lingkungan eksternal maupun internal. Perpaduan dari berbagai faktor yang telah diabstraksi inilah yang akan menentukan daerah tersebut memiliki potensi atau tidaknya. Potensi yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat juga dapat dikembangkan dengan kerja keras masyarakat dan *stakeholders*, adapun hal yang mendukung yaitu pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan juga dasar dan fasilitas umum bagi masyarakat, meningkatkan

kualitas SDM dengan peningkatan kualitas dan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan kerja dan pembukaan lapangan kerja baru, meningkatkan akses kemudahan dan jangkauan pendidikan juga kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan peningkatan sarana dan prasarana dan SDM Aparatur, peningkatan dan pelestarian budaya daerah dengan upaya mengintegrasikan budaya masyarakat Pesisir Barat serta nilai-nilai agama dalam kehidupan serta peningkatan pariwisata sebagai ciri khas dan penopang utama perekonomian daerah.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Muhammad Ali bahwa untuk meningkatkan potensi daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu perlu adanya peninjauan tentang daerah itu sendiri, memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada dan tingkatkan pemanfaataannya seperti pantai-pantai yang tidak ditata, tingkatkan potensi kelautan dan perikanan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat nelayan terhadap Aparatur Daerah, memberikan pembekalan kepada nelayan berupa alat dan pelatihan. Tentu perlu juga meningkatkan kelebihan daerah sebagai penunjuang yaitu mengembangkan potensi Bandara sebagai alat transportasi turis sehingga hal tersebut dapat memberikan kekuatan berupa retribusi untuk daerah. Menurutnya, hal tersebut sangat berkontribusi untuk daerah dalam upaya melakukan percepatan pembangunan.<sup>114</sup> Maka strategi yang harus diterapkan

---

<sup>114</sup> Muhammad Ali (Warga Sipil), wawancara dengan penulis, dermaga seray di Kabupaten Pesisir Barat, 25 Agustus 2017.

Kabupaten Pesisir Barat adalah dengan memaksimalkan potensi yang ada dan menjadikan potensi tersebut sebagai sumber ekonomi daerah, menjaga kelestarian alam dan budaya, jadikan hal tersebut sebagai ciri khas dan kekayaan daerah, tolong dan bekerja sama serta tingkatkan kinerja dan kualitas SDM Aparatur dan masyarakat.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berikut merupakan kesimpulan mengenai potensi dan strategi Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal:

1. Berdasarkan pemaparan sebelumnya terkait program-program dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan program tersebut sebagaimana kaidah-kaidah islam yang terangkum dalam ayat Al-Quran dan Al-Hadist.
2. Berdasarkan hasil pengamatan terkait dengan upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat, daerah tersebut sangat memungkinkan untuk dapat maju dan menjadikan daerah itu lebih unggul dibandingkan daerah lain. Pada dasarnya daerah Kabupaten Pesisir Barat memiliki daya tarik tersendiri yang memungkinkan dapat berkembang dengan pemanfaatan sumberdaya alam, bukan hanya keindahan alamnya saja akan tetapi letak geografis, luas lahan dan kesuburan tanah guna pertanian pun memiliki kontribusi yang cukup jika pemanfaatannya dimaksimalkan. Sementara itu, berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara terkait SDM di Kabupaten Pesisir Barat masih belum memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi

kuantitas, jumlah kebutuhan sumberdaya Aparatur belum seimbang dengan beban kerja dari masing-masing perangkat daerah. Sedangkan dari sisi kualitas juga belum memadai, masih banyak sumberdaya Aparatur yang belum memiliki keahlian khusus dibidang tugasnya, hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Pesisir Barat.

3. Sebagaimana dapat dilihat dari Matrik SWOT Daerah Kabupaten Pesisir Barat memiliki startegi. Potensi yang dimiliki daerah tersebut dapat dikembangkan dengan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam seperti dilakukannya penataan terhadap pantai-pantai sekitar yang berpotensi sebagai tempat parawisata terbaik di Provinsi Lampung, memaksimalkan pengembangan tanaman perkebunan, memperluas area penanaman dan menjadikan hasil tersebut sebagai komoditas unggul, serta memanfaatkan letak geografis sebagai daerah penghubung dan penunjang lalu menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk kegiatan ekonomi.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Melihat potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Pesisir Barat, maka disarankan kepada *stakeholders* dan masyarakat untuk lebih memperhatikan potensi yang ada di daerah tersebut untuk kembali mengelola dan menata SDA. Upayakan peluang sebagai daerah penghubung dan menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang berciri khas tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tidak menghilangkan budaya daerah, selanjutnya gunakan kesempatan tersebut sebagai pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dengan melakukan pelatihan dan tidak mengesampingkan pemberdayaan masyarakat serta memberikan pemahaman dan tingkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat guna percepatan pembangunan Daerah Pesisir Barat. Selain itu peneliti juga menyarankan agar daerah tersebut mendirikan sekolah tinggi dan kejuruan yang tidak lepas dengan ciri khas daerah tersebut, yaitu sekolah kelautan dan perikanan, parawisata, pertanian, perkebunan, perhubungan dan ekonomi.